

ANALISIS PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Untuk mencapai derajat sarjana S-1

Program Studi Ilmu Pemerintahan



OLEH

HARDIYANTI KADIR

E12111261

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2015

LEMBARAN PENGESAHAN**Skripsi****ANALISIS PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

yang diajukan oleh:

HARDIYANTI KADIR**E121 11 261**telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
pada tanggal 06 April 2015
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
NIP. 1963092 1198702 2 001

Pembimbing II



A. Murfi, S.Sos, M.Si
NIP. 19720333328 20012 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
NIP. 19641231 198903 1 027

Ketua Program Studi
Ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Nurlina, M.Si
NIP. 19630921 198702 2 001

LEMBARAN PENERIMAAN**SKRIPSI****ANALISIS PEMBANGUNAN PERTANIAN DI KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG**

yang dipersiapkan dan disusun oleh

Hardiyanti Kadir

E 121 11 261

telah diperbaiki

dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi

pada Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada hari Senin, Tanggal 06 April 2015,

Menyetujui :

PANITIA UJIAN :

Ketua	: Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
Sekretaris	: Drs. Abdul Salam Muchtar
Anggota	: Dr. H. A. Gau Kadir, MA
Anggota	: Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si
Anggota	: A. Murfi, S.Sos, M.Si
Pembimbing I	: Dr. Hj. Nurlinah, M.Si
Pembimbing II	: A. Murfi, S.Sos, M.Si



KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Swt karena atas rahmat dan karuniaNya lah sehingga penelitian dan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang” ini dapat diselesaikan. Dan tak lupa pula penulis panjatkan salam dan shalawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Manusia pilihan terbaik dalam peradaban zaman dikarenakan perjuangan beliau membawa panji risalah suci Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman yang bertaburkan aroma bunga firdaus. Semoga suri tauladan beliau senantiasa mewarnai dan menafasi segala derap langkah dan aktivitas kita.

Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

- Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina N.K., M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1).
- Bapak Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.si selaku Dekan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya atas bantuan dan kerja samanya.
- Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas.

- Ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas.
- Para Dosen dan staf akademik Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan Fisip Unhas yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama duduk di bangku kuliah.
- Kepada ibu Dr. Hj. Nurlinah, M.Si selaku penasehat akademik dan pembimbing I yang telah dengan sungguh-sungguh, tulus, dan sepenuh hati membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini. Kepada bapak A. Murfi, S.Sos, M.Si selaku pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan dengan baik dalam penyelesaian skripsi ini.
- Ayahanda Abd. Kadir dan Ibunda Hj. Naharia terkasih atas seluruh dukungan, perhatian, dan setiap doa yang kalian panjatkan. Kalian adalah penyemangat disetiap langkah yang aku pijakkan dalam mengarungi kehidupan.
- Untuk seluruh teman-teman angkatan Enlightenment 2011, banyak yang kita lalui bersama baik itu suka maupun duka, tidak jarang terjadi kesalahpahaman antara kita yang kadang membuat emosi naik-turun, tapi saya yakin itu menjadikan kita lebih mengenal karakter masing-masing dan semoga kita tidak akan pernah saling melupakan satu sama lain.

- Teman seperjuangan yang bureng-bureng, ati,eka,uni,ummu dan novi. Semoga perjuangan kita mendapat hasil yang sesuai diharapkan. You are the best geng.
- Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) FISIP UNHAS. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, kebersamaan dan kekeluargaan kalian. Jayalah Himapem kita.
- Untuk sahabat-sahabat sekaligus saudara-saudariku yang telah membantu dan memberikan semangat selama proses penyusunan skripsi ini, Haryati, Irfayana, Nirwana Ahmad, Ririn Gustianingsih, Herlina Haruna, Wahyuni, A. Kurniawati, Mariani dan Munarsi M. Banyak yang telah aku pelajari dari kalian tidak saya dapatkan dalam hubungan persahabatan yang lain.
- KKN Regular Unhas Gel.87 Desa Gareccing Kec. Tonra Kab. Bone Kak Andy (Kordes Gareccing), Kak Adel, Enal, Gio, Nurul dan Fitri. Makasih banyak sudah menjadi saudara baru saya selama menjalani KKN kurang lebih 2 bulan, masa-masa bersama kalian sungguh sangat menyenangkan dan sangat berkesan yang tak pernah terlupakan dalam hidup saya. Tak lupa juga buat bunda Darma sekelurga yang telah menjadi keluarga baru kami selama KKN, pak desa dan ibu desa , dan bapak supervisor kami.
- Untuk kekasih paling the best Muh. Fatrah Nur Septian Syah. Terima kasih atas segala waktu, doa, dukungan, dan pengorbanannya. I Love You.

- Untuk saudara dan saudariku, Farlin Kadir, Yusnita Kadir, Gusnita Kadir, Fitri Ramadhani Kadir, dan Firmansyah Kadir atas dukungan dan motivasi kepada penulis. Salam sayang untuk kalian.
- Dan terima kasih kepada seluruh informan atas kesediaan dan waktunya memberikan informasi kepada penulis untuk kepentingan penelitian skripsi ini. Serta pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan semua yang sudah membantu dan memberikan kontribusi kepada penulis selama penyusunan skripsi.

Akhirnya, semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan dukungan, penulis doakan semoga Allah Swt membalasnya dengan pahala yang setimpal serta senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua. *Amin ya Rabbal Alamin.*

Makassar, Maret 2015

Hardiyanti Kadir

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Pengertian Analisis	10
2.2 Pengertian Pembangunan	13
2.3 Pengertian Pemerintah	16
2.4 Pertanian.....	26

1. Pengertian Pertanian	26
2. Produksi Pertanian Padi	31
2.5 Kerangka Konseptual.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Lokasi Penelitian	37
3.2 Tipe Penelitian	37
3.3 Jenis Data	38
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.5 Informan.....	40
3.6 Analisis Data	41
3.7 Definisi Operasional	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1 Letak Geografis Wilayah	43
4.1.2 Topografi dan Iklim.....	43
4.1.3 Tanah	44
4.1.4 Wilayah Administratif.....	47
4.1.5 Penduduk dan Organisasi	49
4.1.6 Tata Ruang Wilayah.....	51
4.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produksi Pertanian Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang	65
4.2.1 Lahan	68

4.2.2	Penanaman	70
4.2.3	Benih	71
4.2.4	Sarana	73
4.2.5	Pemeliharaan	76
4.2.6	Panen	82
4.3	Kondisi Produksi Pertanian Padi Kabupaten Sidenreng Rappang	84
4.3.1	Kondisi produksi pertanian padi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011	85
4.3.2	Kondisi produksi pertanian padi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2012	86
4.3.3	Kondisi produksi pertanian padi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013	91
4.3.4	Kondisi produksi pertanian padi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2014	98
BAB V	PENUTUP	101
5.1	Kesimpulan	101
5.2	Saran	103
DAFTAR	PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN	107

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
4.1	Jenis Tanah per Kecamatan dalam Kabupaten Sidrap.....	50
4.2	Luas Baku Sawah menurut Pengairannya Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	51
4.3	Luas Sawah Ditanami tahun 2013	52
4.4	Nama, Luas Wilayah per kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan	53
4.5	Jumlah penduduk Per Kecamatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	55
4.6	Inventarisasi Nama dan Kelompok UPJA Tahun 2013.....	56
4.7	Perkembangan Gapoktan dan Poktan tahun 2013.....	57
4.8	Perluasan Sawah Tahun 2012.....	77
4.9	Nama-nama Kelompok Tani Penerima Manfaat Bansos Tahun Anggaran 2012	82
4.10	Realisasi Penggunaan Pupuk pada Musim Tanam Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	84
4.11	Realisasi Penggunaan Pupuk pada Musim Tanam Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	85
4.12	Realisasi Penggunaan Pestisida Tahun 2012.....	88

4.13	Realisasi Penggunaan Pestisida Tahun 2013.....	89
4.14	Realisasi Produksi Padi Tahun 2011 Kabupaten Sidenreng Rappang	93
4.15	Produksi Padi Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	94
4.16	Realisasi Produksi Padi Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang	95
4.17	Realisasi Penggunaan Varietas Per Musim Tanam Tahun 2012.....	97
4.18	Luas Serangan Hama/Penyakit pada Tanaman Padi Musim Tanam 2011/2012 dan Tahun 2012.....	97
4.19	Luas Kerusakan (puso) pada Tanaman Padi Tahun 2012.....	99
4.20	Produksi Padi Tahun 2013 dibanding Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	100
4.21	Realisasi Produksi Padi Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang	102
4.22	Realisasi Penggunaan Varietas Per Musim Tanam Tahun 2013.....	103
4.23	Luas Serangan Hama/Penyakit pada Tanaman Padi Musim Tanam 2012/2013 dan Tahun 2013.....	104
4.24	Luas Kerusakan (puso) pada Tanaman Padi Tahun 2013.....	
4.25	Estimasi Luas Panen, Hasil/Hektar dan Produksi (Padi Sawah dan Padi Ladang) Berdasarkan Hasil Perhitungan Angka	

	Tetap Provinsi 2014 Provinsi: Sulawesi Swlatan, Kabupaten: Sidenreng Rappang.....
4.26	Luas Serangan Hama/Penyakit pada Tanaman Padi Musim Tanam 2013/2014 dan Tahun 2014.....
4.27	Perbandingan Produksi Padi Tahun 2011-2014 Kabupaten Sidrap.....

DAFTAR GAMBAR

Nomor		Halaman
1	Skema Kerangka Konseptual.....	41
2	Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang	54

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor		Halaman
1	Pedoman Wawancara	114
2	Dokumentasi	116
3	Surat Izin Penelitian.....	118
4	Surat Keterangan Penelitian.....	120
5	SK Bupati Sidrap No. 82 tahun 2013.....	

INTISARI

Hardiyanti Kadir. E121 11 261. Analisis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Dibimbing oleh Pembimbing I, Dr. Hj. Nurlinah, M.Si dan Pembimbing II, A. Murfi, S.Sos, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) menggambarkan kondisi produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tipe penelitian adalah deskriptif. Adapun informan penelitian ini Kepala dan Aparat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang, Petani Pemilik, Petani Penggarap, Petani Pemilik dan Penggarap, serta Ketua Kelompok tani. Data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap informan, observasi dan dokumentasi selama kurang lebih satu bulan di lapangan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) upaya pemerintah daerah dalam hal peningkatan produksi pertanian diantaranya pembinaan dan peningkatan keterampilan/kemampuan petani, pembinaan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian serta operasional pengendalian hama dan penyakit.; (2) kondisi produksi pertanian padi pada tahun 2014 meningkat di bandingkan pada tahun 2011,2012 dan 2013.

Kata Kunci: pemerintah daerah, produksi pertanian padi

ABSTRACT

Hardiyanti Kadir. E121 11 261. Analysis of Agricultural Development in Sidenreng Rappang. Under Guidance are 1, Dr. Hj. Nurlinah, M.Si and Advisor 2, Andi Murfi, S. Sos, M.Sc.

This study aims to: (1) describe the efforts of local governments to increase agricultural production of rice in Sidenreng Rappang; (2) describe the conditions of agricultural production of rice in Sidenreng Rappang.

This study used qualitative approach and the type is descriptive type. The conclusions of this research informants and Apparatus Head of Department of Agriculture and Plantation in Sidenreng Rappang, Owner Farmer, Farmer Cultivators, Farmers owners and cultivators, and chairman of the farmer. Data obtained from indepth interviews to informants, observation and documentation for approximately one month in the field. Data were analyzed by descriptive qualitative.

The results of this study indicate that: (1) the efforts of local governments in terms of increased agricultural production including development and improvement of skills or abilities of farmers, development of agricultural infrastructure needs and operational control of pests and diseases; (2) the conditions of agricultural production of rice in the 2014 increased compared to the year 2011, 2012 and 2013.

Key words: local government, agricultural production of rice

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang-undang RI No. 12 Tahun 2008 jo No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang dan tantangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah. Disatu sisi lahirnya Undang-undang tersebut memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada di daerah. Di sisi yang lain peluang yang besar tersebut disertai dengan tantangan berupa kewajiban untuk membiayai sendiri semua kegiatan pemerintahan di daerah. Peluang dan tantangan yang besar tersebut hanya bisa dijawab oleh bagaimana pemerintah daerah menggali semua potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di daerah tersebut.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.

Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Adapun pada pasal 12 ayat (13) menjelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah salah satu diantaranya yakni urusan di bidang pertanian.

Bagi suatu daerah yang akan melaksanakan pembangunan ekonominya, tersedia beberapa pilihan yang tentu akan dianut. Ada suatu daerah yang dalam pembangunan ekonominya bertumpu pada sektor industri untuk kemudian baru menyusul sektor-sektor lainnya. Ada daerah yang memprioritaskan sektor pertanian dari pada lainnya, dan ada pula daerah yang memilih alternatif gabungan yaitu yang menyeimbangkan antara sektor industri dan sektor pertanian. Seperti di Indonesia sendiri, sejak masa orde baru pemerintah telah menetapkan sektor pertanian sebagai pilihan utama yang diharapkan dapat dijadikan landasan bagi berlangsungnya industrialisasi Indonesia. (Hadi Prayitno, 1985:13)

Sejak manusia pertama kali menempati bumi, lahan atau tanah sudah menjadi salah satu unsur utama yang digunakan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Konkritnya, lahan difungsikan sebagai tempat manusia beraktivitas untuk mempertahankan eksistensinya. Aktivitas

yang pertama kali dilakukan adalah pemanfaatan lahan yang digunakan untuk bercocok tanam (pertanian). Hal ini terbukti dengan banyaknya masyarakat didunia (termasuk Indonesia) yang bekerja sebagai petani. Karena subur dan luasnya lahan di Indonesia, menyebabkan negara ini menyandang gelar sebagai negara agraris. Hingga saat ini, Indonesia masih merupakan negara pertanian, artinya pertanian memegang peranan penting dari keseluruhan perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya penduduk atau tenaga kerja yang hidup atau bekerja pada sektor pertanian atau dari produk nasional yang berasal dari pertanian. (Mubyarto, 1989:12)

Tanah merupakan suatu unsur yang sangat penting bagi kehidupan. Dimana, tanah merupakan salah satu unsur produksi yang turut menentukan keberhasilan suatu usaha tani. Selain itu, tanah juga sangat diperlukan dalam berbagai keperluan lainnya. Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai sumber daya tanah yang sangat luas dan sebagian besar merupakan lahan kering yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan usaha pertanian. Potensi lahan kering disetiap tempat yang tersebar di nusantara berbeda yang satu dengan yang lainnya, dengan adanya perbedaan itu perlu dilakukan pemilihan jenis usaha tani dan macam teknologi sesuai dengan potensi lahan disetiap tempat.

Perkembangan pembangunan suatu daerah tidak terlepas dari beberapa faktor, termasuk Visi, Misi, arah pembangunan daerah (

RPJP, RPJMD, RKPD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebutuhan dan respon masyarakat, kondisi geografis, sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), serta tingkat investasi dari investor ke daerah tersebut.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 – 2018 adalah dokumen perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta sesuai dengan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Selain itu, RPJM Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2013 –2018 juga memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah yang bersifat indikatif dan berfungsi sebagai tolok ukur kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2013 – 2018 dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) guna menjadi landasan pokok dalam penyusunan kebijakan umum pembangunan dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah.

Kabupaten Sidenreng Rappang selama ini dikenal sebagai lumbung beras nasional. Kabupaten yang biasa juga disingkat Sidrap adalah daerah yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 180 km di sebelah utara Makassar. Luas wilayahnya 1.883,25 Km² atau sekitar 3% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan. Wilayah ini memiliki dataran rendah sebanyak 47% dari seluruh luas kabupaten. Dari dataran ini terbentang lahan 44.959,00 Ha pada tahun 2013, yang dikelola oleh 60% tenaga kerja produktif penduduknya. Kabupaten Sidrap terdiri dari 11 kecamatan dan 106 desa/kelurahan.

Kabupaten Sidrap adalah salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki potensi pertanian yang sangat luas dengan sistem pengairan yang teratur, pola tanam, dan tata cara penggarapan yang cukup modern yang masa panennya minimal 2 kali setahun dan maksimal 5 kali dalam dua tahun. Hingga saat ini, pertanian masih menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian daerah di Kabupaten Sidrap. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (46%) dan menyerap kurang lebih 55% tenaga kerja yang ada. Luas sawah di Kabupaten Sidrap adalah 44,959 Ha, produksi padi pada tahun 2012 adalah 457.986 ton kemudian meningkat sekitar 0,80% pada tahun 2013 yakni 461.617,45 ton. Peningkatan produksi padi ini mengantarkan Kabupaten Sidrap mendapat penghargaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan dari Presiden RI bapak Susilo

Bambang Yudhoyono sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di kawasan Indonesia Timur setiap tahunnya. (Ujungndang Ekspres, 22 Maret 2014)

Sebagai daerah yang berada di perlintasan Provinsi Sulawesi Selatan, menjadikan Kabupaten Sidrap memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengembangan perekonomian daerah dimasa mendatang, mengingat daerah Kabupaten Sidrap merupakan jalur perlintasan yang menghubungkan Provinsi Sulawesi Selatan dan daerah lain di Pulau Sulawesi. Dalam konteks ini diperlukan penanganan yang lebih terencana, terpadu, dan komprehensif dalam menata seluruh potensi ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan itu, diperlukan suatu pemerintahan yang lebih menekankan dan memberikan perhatian penuh pada aspirasi masyarakat, pemenuhan hak dasar masyarakat dan berupaya untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dengan tetap memperhatikan setiap potensi dan hasil-hasil produksi daerah yang memiliki keunggulan kompetitif, memiliki nilai jual tinggi, ditengah persaingan yang semakin kompetitif.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki keleluasan dalam perumusan permasalahan dan kebijakan pembangunan pertanian. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan akan mampu menjamin efesiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan pertanian, sehingga dapat memberikan manfaat yang

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk mengurangi resiko kegagalan dari usaha tani maka perlu dilakukan berbagai pola usaha tani secara terpadu sesuai dengan potensi lahannya masing-masing. Pola usaha tani ini akan mendukung setiap kegiatan pertanian yang dilakukan disetiap lahan.

Hasil dari usaha tani itu merupakan bahan dasar bagi kehidupan manusia . Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kehidupan manusia tidak akan berlanjut tanpa adanya pertanian. Oleh karena itu, pertanian di Kabupaten Sidrap harus semakin ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Salah satunya yaitu peran pemerintah daerah dalam membantu para petani di Kabupaten Sidrap melakukan kegiatan pertanian khususnya dukungan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan produksi sektor pertanian di daerah serta mendorong sektor pertanian yang tengah dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, keterbatasan di dalam infrastruktur, menurunnya ketersediaan air, dan daya dukung prasarana irigasi, adanya serangan hama dan penyakit, serta terjadinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Bertitik tolak dari latar belakang masalah tersebut di atas maka diadakan penelitian mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul:

***“Analisis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sidenreng
Rappang”.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka dapat secara spesifik dirumuskan masalah untuk memudahkan dalam penelitian. Rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimanakah upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Bagaimanakah kondisi produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk menggambarkan kondisi produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis, hasil penelitian diharapkan berguna sebagai suatu karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan khususnya perkembangan ilmu pemerintahan dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti

maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama.

2. Manfaat praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai suatu bahan informasi, masukan, dan pertimbangan demi menghasilkan konsep pengelolaan pertanian yang lebih berkualitas dan lebih baik lagi dimasa mendatang.
3. Manfaat bagi penulis, dapat menambah dan memperluas wawasan/ pengetahuan penulis dalam penulisan karya ilmiah terkait dengan permasalahan yang penulis teliti, serta merupakan pembelajaran dan pengalaman yang berharga dalam mengapresiasi/mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama proses perkuliahan. Sekaligus untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana pada jurusan ilmu politik dan ilmu pemerintahan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Analisis

Analisis dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang untuk kedalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, hambatan-hambatan yang terjadi dalam kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya.

Menurut Komaruddin (2001:53) definisi analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu.

Minto Rahayu, analisa adalah suatu cara membagi-bagi suatu subjek ke dalam komponen-komponen; berarti melepaskan, menanggalkan, menguraikan sesuatu yang terikat padu.

Menurut Yakub, konsep teori Analisa dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memahami kondisi yang ada, dengan menganalisa jabatan dan uraian tugas (business users), proses bisnis (business proses), ketentuan atau aturan (business rule), masalah dan mencari solusinya (business problem and business solution), dan rencana-rencana perusahaan (business plan).

Menurut Mulyato, konsep Analisa sistem adalah teori sistem umum yang sebagai sebuah landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi didalam sistem yang sedang berjalan agar menjadi lebih efisien, mengubah sasaran sistem yang sedang berjalan, merancang/mengganti output yang sedang digunakan, untuk mencapai tujuan yang sama dengan seperangkat input yang lain (biasa jadi lebih sederhana dan lebih interatif) atau melakukan beberapa perbaikan serupa.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang dikemukakan di atas dapat dikatakan bahwa analisis sistem adalah suatu proses sistem yang secara umum digunakan sebagai landasan konseptual yang mempunyai tujuan untuk memperbaiki berbagai fungsi didalam suatu sistem tertentu.

Tahap-tahap Analisis Menurut Mulyanto yakni tahap analisis merupakan tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan di dalam tahap ini akan menyebabkan juga kesalahan di tahap selanjutnya. Tahapan ini bisa merupakan tahap yang mudah jika klien sangat paham dengan masalah yang dihadapi dalam organisasinya dan tahu betul fungsionalitas dari sistem informasi yang akan dibuat. Tetapi tahap ini bisa menjadi tahap yang paling sulit jika klien tidak bisa mengidentifikasi kebutuhannya atau tertutup terhadap pihak luar yang ingin mengetahui detail-detail proses bisnisnya.

Kerangka analisis *Stokey Zeckhauser* terdiri atas lima bagian, yaitu :

1. Membangun konteks. Apa masalahnya dan apa tujuannya?
2. Landasan pemilihan alternative. Apa langka alternatifnya? Dan kemungkinan menghimpun informasinya.
3. Prediksi tentang konsekuensi untuk setiap teknik yang relevan.
4. Membobot hasil. Apa kriteria keberhasilannya. Mengidentifikasi alternative yang lebih baik dan yang kurang baik.
5. Menetapkan pilihan. Digambarkan seluruh aspek dan preferensinya. (Noeng Muhadjir, 2004:141)

Menurut Mulyanto, di dalam tahap analisis terdapat langkah-langkah dasar yang harus dilakukan oleh seorang analis, diantaranya adalah :

1. Identify, yaitu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah.
2. Understand, yaitu memahami kerja dari sistem yang ada.
3. Analysis, yaitu melakukan analisa terhadap sistem.
4. Report, yaitu membuat laporan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Adapun fungsi analisa sistem adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah–masalah kebutuhan pemakai (user)

2. Menyatakan secara spesifik sasaran yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan pemakai
3. Memilih alternatif–alternatif metode pemecahan masalah yang paling tepat.
4. Merencanakan dan menerapkan rancangan sistemnya. Pada tugas atau fungsi terakhir dari analisa sistem menerapkan rencana rancangan sistemnya yang telah disetujui oleh pemakai.

2.2 Pengertian Pembangunan

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi kedalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan (Lewwellen 1995, Larrin 1994, Kiely 1995 dalam Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori mikro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial dan teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan mencakup teori-teori keterbelakangan (underdevelopment) ketergantungan (dependent development) dan sistem dunia (world system theory) sesuai dengan klasifikasi Larrain (1994). Sedangkan Tikson (2005) membaginya kedalam tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, keterbelakangan dan ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut itulah kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat mengartikan kata pembangunan. Sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perpektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan Marxis, modernisasi memperkaya ulasan pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, ada tema-tema pokok yang menjadi pesan didalamnya. Dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004).

Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat diartikan bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek kehidupan. Adapun mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang mampu berperan secara efisien, transparan, dan adil. Tema ketiga mencapai aspirasi yang paling manusiawi, yang berarti pembangunan harus

berorientasi kepada pemecahan masalah dan pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Siagian (1994) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usahapertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negaa dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation building)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (1994) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transfrmasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebaliknya, kontribusi sektor pertanian akan semakin kecil dan berbanding terbalik dengan pertumbuhan industrialisasi dan modernisai ekonomi. Transformasi sosial dapat dilihat melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, seperti pendidikan,

kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan transformasi budaya sering dikaitkan antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping adanya perubahan nilai dan norma yang dianut masyarakat, seperti perubahan spiritualisme ke materialisme/sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi modern dan rasional.

Demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

2.3 Pengertian Pemerintah

Konsep "pemerintah" didefinisikan dalam konteks pemerintahan, yang oleh Surianingrat (1998) diindikatori oleh adanya hubungan yang berlangsung dalam kerangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Hubungan yang terjadi adalah hubungan yang berlangsung secara fungsional antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dengan rakyat sebagai pihak yang dikuasai. Kepenguasaan dalam kerangka hubungan tidak diarahkan pada konsep hegemoni secara otoriter akan tetapi dapat

pula berlangsung dalam kerangka demokratis. Kepenguasaan akan terlihat pada penggunaan intisari “pemerintah” yaitu “perintah” yang tidak dipersamakan dengan order atau direction akan tetapi bermakna fungsional dalam upaya pengayoman, pelayanan dan pembangunan. Sepanjang ketiga fungsi itu diwujudkan oleh pemerintah maka hubungan kekuasaan akan berlangsung. Dalam fungsi pengayoman akan berlangsung hubungan kekuasaan dalam pengaturan, fungsi pelayanan akan berlangsung hubungan kekuasaan dalam pemenuhan kebutuhan, dan fungsi pembangunan akan berlangsung hubungan kekuasaan pemberdayaan. Dari konsepsi “pemerintah” dalam pemerintahan inilah, maka terkandunglah makna atas “Pemerintah dan Rakyat” dalam satu kesatuan fungsi pelaksanaan kekuasaan tugas-tugas pemerintahan. Dari sinilah dapat pula diartikan bahwa obyek material dari ilmu pemerintahan adalah manusia pemerintahan, manusia yang berada dalam kerjasama pemerintahan, kerjasama antara pemerintah dengan rakyat sebagai pihak yang diperintah. Tanpa suatu kerjasama maka tujuan yang diinginkan oleh negara tidak akan tercapai.(Faried Ali, Andi Syamsu Alam, 2012:5)

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Pemerintah juga merupakan

suatu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara.

Dalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yaitu yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat atau masyarakat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengatur dan mengurus.
3. Hak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara vertikal maupun horizontal.

Jika dihubungkan dengan peran pemerintah, maka pemerintah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menyelenggarakan segala kepentingan rakyat dalam mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan untuk mensejahterakan rakyatnya. Menurut Rasyid (1996 : 48) mengatakan: “ada tiga fungsi pemerintahan yang paling hakiki, yaitu : pelayanan (*public service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Inti dari ketiga fungsi pemerintahan tersebut adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam membangun fasilitas- fasilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, diaman tuntutan

akan pelayanan tersebut selalu meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat”.

Pemerintah juga merupakan satu badan penyelenggaraan atas nama rakyat untuk mencapai tujuan negara, sedangkan proses kegiatannya disebut pemerintahan dan besar kecilnya kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat, dengan demikian pemerintah dalam menjalankan proses kegiatan negara harus berdasarkan kemauan rakyat, karena rakyatlah yang menjadi jiwa bagi kehidupan dan proses berjalannya suatu negara.

Menurut Taliziduhu Ndraha (2003 : 6) pemerintah adalah : Organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang diperlukan sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu sah (legal) dalam wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Montesquieu (dalam Salam, 2004:35) pemerintah adalah seluruh lembaga negara yang biasa dikenal dengan nama *trias politica* baik itu legislative (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), maupun yudikatif (mengawasi pelaksanaan undang-undang).

Konsep pemerintah didefinisikan oleh Istianto (2009:25) adalah: merupakan suatu bentuk organisasi dasar dalam suatu negara. Tujuan dari pemerintah dikatakan oleh Ateng Syafrudin di kutip Istianto (2009:25) bahwa: Pemerintah harus bersikap mendidik dan memimpin yang diperintah, ia harus serempak dijiwai oleh semangat yang diperintah, menjadi pendukung dari segala sesuatu yang hidup diantara mereka bersama, menciptakan perwujudan segala sesuatu yang diinginkan secara samar-samar oleh semua orang, yang dilukiskan secara nyata dan dituangkan dalam kata-kata oleh orang-orang yang terbaik dan terbesar.

Ensiklopedia Nasional Indonesia, volume 12 (1997), memberikan terminology “pemerintah” dalam dua sisi pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan dalam pengertian yang luas. Pengertian sempit, pemerintah diartikan sebagai pemegang kekuasaan eksekutif; sedangkan dalam artian luas adalah seluruh lembaga dan kegiatannya dalam suatu negara, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan legislatif dan yudikatif. Pengertian ini memberikan makna bahwa pemegang kekuasaan tidak saja difokuskan pada lembaga eksekutif akan tetapi mereka para pelaku kelembagaan dalam berbagai kegiatannya dalam kehidupan suatu negara baik itu lembaga eksekutif, legislative dan yudukatif. Semuanya itu disebut sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan, yang secara konkret adalah mereka yang

mengemban bidang tugas pokok dan yang utama, yaitu melaksanakan kehendak negara sebagaimana diperintahkan oleh konstitusi negara.(Faried Ali, Andi Syamsu Alam, 2012:3)

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni karena berapa banyak pemimpin yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan, sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan, adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan memiliki objek, baik objek materi maupun formal, universal sistematis secara spesifik(khas).(Inu Kencana, 2001:20)

Pemerintah Daerah

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) adalah sebagai berikut: pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat

sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang.

Pemerintah daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk kabupaten disebut wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai Pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Dinas Kabupaten/Kota merupakan unsure pelaksana pemerintah Kabupaten/Kota. yang dipimpin oleh seorang Kepala

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pada dasarnya dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi, maka dinas Kabupaten/Kota harus menyelenggarakan kewenangan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.

Pada Dinas Kabupaten/Kota dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berfungsi melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Fungsi-fungsi yang dilakukan adalah meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
3. Pembinaan terhadap UPTD.

Pada daerah Kabupaten dan Kota terdapat Kecamatan sebagai perangkat daerah Kabupaten dan Kota. Perangkat Kecamatan adalah Kelurahan. Pada daerah Kabupaten terdapat Desa (atau nama lainnya sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat). Di Desa dibentuk pemerintahan desa yang

terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa/BPD.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menciptakan iklim pemerintahan daerah yang lebih maju dan mampu menghasilkan pembangunan yang merata, luas dan bertanggung jawab. Pada era otonomi setiap daerah harus berusaha menggali potensi yang dimiliki daerah. sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Undang-undang no 23 tahun 2014 mengisyaratkan bagi setiap daerah untuk bekerja lebih dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan efektif serta memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah agar tercipta kondisi yang harmonis antar pemerintahan.

Sesuai dengan pendapat tentang pelaksanaan Otonomi Daerah pengertian Pemerintah Daerah menurut Misdyanti dan Kartasapoetra adalah, "Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah adalah pemegang kemudi dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah." (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993:17).

Pengertian lain mengenai Pemerintah Daerah tercantum dalam *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintahan*

Desa dan Kelurahan bahwa “Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra adalah:

1. Fungsi otonomi

Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Fungsi pembantuan

Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks

4. Fungsi lainnya

Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:

- a. Pembinaan wilayah
- b. Pembinaan masyarakat
- c. Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum. (Misdyanti dan Kartasapoetra, 1993: 20-27).

2.4 Pertanian

2.4.1. Pengertian Pertanian

Pertanian dalam arti luas (*Agriculture*), dari sudut pandang bahasa (etimologi) terdiri atas dua kata, yaitu *agri* atau *ager* yang berarti tanah dan *culture* atau *colere* yang berarti pengelolaan. Jadi pertanian dalam arti luas (*Agriculture*) diartikan sebagai kegiatan pengelolaan tanah. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk kepentingan kehidupan tanaman dan hewan, sedangkan tanah digunakan sebagai wadah atau tempat kegiatan pengelolaan tersebut, yang kesemuanya itu untuk kelangsungan hidup manusia.

Adapun batasan atau definisi *agriculture* menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut *Van Aarsten* (1953), *agriculture* adalah digunakannya kegiatan manusia untuk memperoleh hasil yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan atau hewan yang pada mulanya dicapai dengan jalan sengaja menyempurnakan segala kemungkinan yang

telah diberikan oleh alam guna mengembangbiakkan tumbuhan dan atau hewan tersebut.

Dari batasan tersebut jelas bahwa untuk dapat disebut sebagai pertanian perlu dipenuhi beberapa persyaratan:

- a. adanya alam beserta isinya antara lain tanah sebagai tempat kegiatan, dan tumbuhan serta hewan sebagai obyek kegiatan.
 - b. adanya kegiatan manusia dalam menyempurnakan segala sesuatu yang telah diberikan oleh alam dan atau Yang Maha Kuasa untuk kepentingan/ kelangsungan hidup manusia melalui dua golongan yaitu tumbuhan/tanaman dan hewan/ternak serta ikan.
 - c. ada usaha manusia untuk mendapatkan produk/hasil ekonomis yang lebih besar daripada sebelum adanya kegiatan manusia.
2. Menurut *Mosher* (1966), pertanian adalah suatu bentuk produksi yang khas, yang didasarkan pada proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Petani mengelola dan merangsang pertumbuhan tanaman dan hewan dalam suatu usaha tani, dimana kegiatan produksi merupakan bisnis, sehingga pengeluaran dan pendapatan sangat penting artinya.
 3. Menurut *Spedding* (1979), pertanian dalam pandangan modern merupakan kegiatan manusia untuk manusia dan dilaksanakan guna memperoleh hasil yang menguntungkan sehingga hms pula meliputi kegiatan ekonomi dan pengelolaan di samping biologi.

Pengertian pertanian dalam arti sempit (*Agronomy*) menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

1. Menurut *Kipps* (1970), *Agronomy* adalah: *the study of applied of the science of soil management and of the production of crops* (studi tentang aplikasi ilmu pengelolaan tanah dan produksi tanaman).
Dari batasan di atas jelas bahwa *agronomy* adalah ilmu yang mempelajari tentang *pengelolaan* tanah untuk kehidupan tanaman sehingga tidak termasuk kehidupan hewan. Oleh karena itu *agronomy* cakupannya lebih sempit apabila dibandingkan dengan *agriculture*.
2. Menurut Samsu'ud Sadjad (1977), *agronomy* atau agronomi dari bahasa berasal dari kata *agros* yang berarti lapang, dan *nomos* yang berarti pengelolaan, sehingga agronomi berarti pengelolaan lapang produksi dengan sasaran produksi fisik yang maksimum.
3. Menurut Sumantri (1980), agronomi adalah ilmu yang mempelajari segala aspek biofisik yang berkaitan dengan usaha penyempurnaan budidaya tanaman untuk memperoleh produksi fisik yang maksimum.
4. Menurut Sri Setyati Harjadi (1986), agronomi adalah ilmu yang mempelajari cara pengelolaan tanaman pertanian dan lingkungannya untuk memperoleh produksi yang maksimum.

Pertanian merupakan suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan

pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang termasuk dalam pertanian biasa disebut sebagai budidaya tanaman atau bercocok tanam. Dalam pertanian ada suatu istilah “Usaha Tani” yaitu bagian inti dari pertanian karena menyangkut sekumpulan kegiatan yang dilakukan dalam budidaya. Petani adalah sebutan bagi mereka yang melakukan usaha tani.

Pertanian dalam pengertian yang luas mencakup semua kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, pertanian juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.

Semua usaha pertanian pada dasarnya adalah kegiatan ekonomi sehingga memerlukan dasar-dasar pengetahuan yang sama akan pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih atau bibit, metode budidaya, pengumpulan hasil, distribusi produk dan pemasaran. Apabila seorang petani memandang semua aspek ini dengan pertimbangan efisiensi untuk mencapai keuntungan yang maksimal maka ia melakukan pertanian intensif, yaitu sistem pembudidayaan tanaman yang menggunakan masukan seperti tenaga kerja dan modal dalam ukuran yang sangat besar, relatif

terhadap luas lahan. Hal ini dilakukan karena pertimbangan efisiensi lahan untuk meraih keuntungan besar.

Selain melakukan pertanian intensif, seorang petani juga perlu melakukan pertanian ekstensif, yaitu suatu sistem pembudidayaan tanaman dengan menggunakan masukan modal dan tenaga kerja yang rendah, relatif terhadap luas lahan usaha yang dipakai. Hasil yang diperoleh banyak bergantung pada kesuburan tanah asal, topografi, iklim dan ketersediaan air. Masukan teknologi biasanya bukan hal yang mendesak karena dalam pertanian semacam ini luas lahan yang menjadi andalan.

Pertanian ekstensif ini merupakan pertanian yang dalam bentuk paling ekstrem dan tradisional yang akan berbentuk subsisten, yaitu hanya dilakukan tanpa motif bisnis dan semata hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau komunitasnya. Program ekstensifikasi yang dijalankan pemerintah Indonesia di masa orde baru, tidak ada kaitannya dengan pertanian ekstensif, meskipun bagi para petani yang mengikuti program tersebut melalui transmigrasi mendapat lahan seluas 2 hektare. Program itu lebih tepat disebut “ekspansi pertanian” atau “perluasan lahan pertanian”.

Sebagai suatu usaha, pertanian memiliki 2 ciri penting ; selalu melibatkan barang dalam volume besar dan proses produksi memiliki resiko yang relatif lebih tinggi. 2 ciri khas ini muncul karena

pertanian melibatkan makhluk hidup dalam satu atau beberapa tahapnya dan memerlukan ruang untuk kegiatan itu serta jangka waktu tertentu dalam proses produksi. Beberapa bentuk pertanian modern misalnya budidaya alga dan hidroponika telah dapat mengurangi ciri-ciri ini tetapi sebagian besar usaha pertanian dunia masih tetap demikian.

Di Indonesia, pertanian merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian yaitu lebih kurang 75% yang tersebar di seluruh Nusantara. Oleh karena itu mulai pelita I sampai pelita IV pembangunan difokuskan kepada sektor pertanian. Beberapa usaha yang telah ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian adalah dengan usaha intensifikasi dan ekstensifikasi.

2.4.2. Produksi Pertanian Padi

Dalam percakapan sehari-hari produksi diartikan tindakan mengkombinasikan faktor-faktor produksi (tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya) oleh perusahaan untuk memproduksi hasil berupa barang-barang dan jasa-jasa. Dengan barang-barang tersebut, untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi manusia tidak dapat lepas dari proses produksi, karena sesuai kata mengkombinasikan diatas adalah menjadikan suatu barang output dari beberapa barang

input. Sebab produksi adalah proses menghasilkan barang dan jasa.

Kata produksi berasal dari bahasa Inggris *to produce* yang artinya menghasilkan. Jadi, produksi berarti kegiatan menghasilkan atau menciptakan barang dan jasa. Lengkapnya, produksi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau badan (produsen) untuk menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa.

Tumbuhan padi yang menghasilkan beras, termasuk jenis *Oryza* (*Oryza sativa* L.) adalah salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban manusia. Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga (genus) yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal dari India atau Indo cina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM. Produksi padi dapat dikatakan sebagai hasil dari segala upaya yang dilakukan petani maupun badan yang terkait dalam proses pertanian padi tersebut.

2.5 Kerangka Konseptual

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pendelegasian kewenangan ditinjau dari visi implementasi praktis di daerah dapat

disederhanakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu pendelegasian kewenangan politik, pendelegasian kewenangan urusan daerah, pendelegasian kewenangan pengelolaan keuangan.

Substansi kewenangan daerah mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan, kecuali politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Adapun pada pasal 12 ayat (13) menjelaskan bahwa yang menjadi urusan pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan daerah salah satu diantaranya yakni urusan di bidang pertanian.

Berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (3) adalah sebagai berikut: pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat

sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang.

Pemerintah daerah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk kebugatan disebut wakil bupati. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah selaras dengan azas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dapat diwujudkan dalam fungsi-fungsi pemerintah daerah. Adapun fungsi pemerintah daerah menurut Misdyanti dan R.G. Kartasapoetra adalah:

1. Fungsi otonomi

Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

2. Fungsi pembantuan

Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

3. Fungsi Pembangunan

Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks

4. Fungsi lainnya

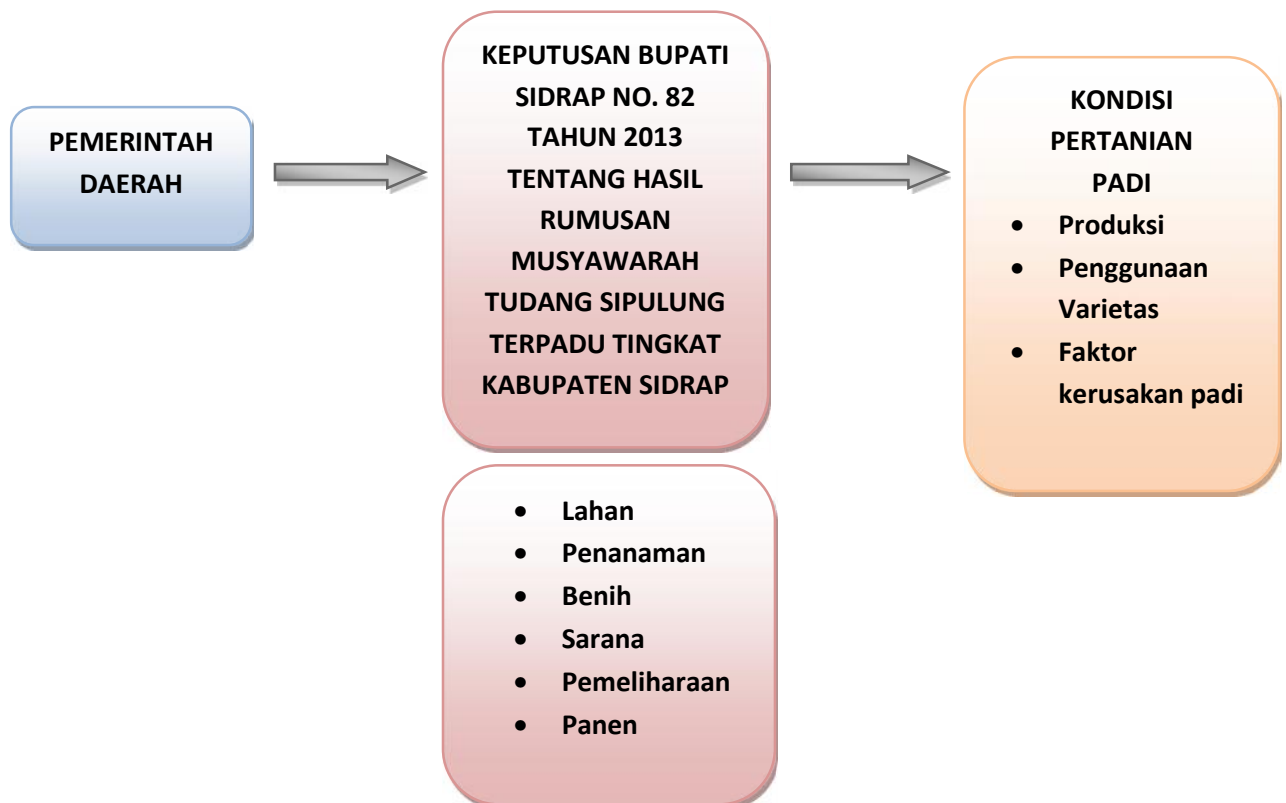
Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah pembinaan wilayah, pembinaan masyarakat, pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Di Indonesia, pertanian merupakan prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian yaitu lebih kurang 75% yang tersebar di seluruh Nusantara. Oleh karena itu mulai pelita I sampai pelita IV pembangunan difokuskan kepada sektor pertanian. Untuk itulah dibutuhkan peran oleh pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian khususnya yang ada di daerah.

Peran pemerintah dalam hal ini bagaimana mereka turut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan upaya peningkatan produksi pertanian padi seperti penyediaan lahan, penanaman bibit, pupuk, sarana sampai kepada masa panen.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka dapat dijelaskan kerangka konseptual yang akan mempermudah alur penelitian. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian.

Gambar 1. Bagan Kerangka Konseptual



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang di angkat, yakni “Analisis Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang”, maka sangat jelas penelitian yang dilakukan ini mengambil lokasi di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Terkhusus pada instansi atau lembaga yang erat kaitannya dengan Kebijakan Pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun wawancara di lakukan di tiga kecamatan dengan mempertimbangkan kondisi kesuburan tanah, diantaranya:

- a. Kecamatan Watang Sidenreng
- b. Kecamatan MaritengngaE
- c. Kecamatan Panca Rijang

3.2 Tipe Penelitian

Adapun tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha untuk mendiskripsikan atau menggambarkan tentang kebijakan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang. Desain penelitian deskriptif bermaksud mengamati secara lengkap dan mencari hubungan dengan konsep yang lain, tanpa pengujian hipotesa atau

hubungan tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini, maka objek penelitian ialah peningkatan produksi pertanian. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggambarkan bagaimana adanya fakta-fakta yang ditemukan pada masa sekarang, selanjutnya menganalisa dan menafsirkan fakta-fakta tersebut serta mengambil kesimpulannya.

3.3 Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yang bersumber dari wawancara (interview), observasi dengan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan analisis isi dari bahan-bahan tertulis. Wawancara (interview) tentang kebijakan pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah data diperoleh dari dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, data yang akan diperoleh berdasarkan sumbernya dapat diklasifikasikan dari dua sumber yaitu:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan berdasarkan pedoman yang telah dibuat serta pengamatan secara langsung terhadap responden.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip resmi, yang dapat mendukung kelengkapan data primer.

Penggunaan data primer dan data sekunder secara bersama-sama dimaksudkan agar saling melengkapi yang disesuaikan dengan keperluan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data diperoleh dari data primer maupun sekunder. Dalam hal ini:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Kegiatan pengamatan terhadap obyek penelitian ini untuk memperoleh keterangan data yang lebih akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara yaitu kegiatan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data guna kelengkapan data-data yang diperoleh sebelumnya.

3. FGD (Focus Group Discussion)

FGD merupakan diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas suatu masalah tertentu, dalam suasana formal maupun santai.

4. Dokumentasi

Penelitian dengan dokumentasi maksudnya adalah dalam proses pengumpulan data diperoleh dari data tertulis seperti; dokumen resmi, arsip-arsip, buku-buku maupun literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian.

4.5 Informan

Informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui dan atau terlibat langsung dengan fokus permasalahan sehingga peneliti dapat merangkum informasi yang penting dalam fokus penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan jumlah informan yang dipilih adalah orang yang ahli dalam bidangnya khususnya dalam peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

- a. Kepala dan Aparat Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang
- b. Petani Pemilik
- c. Petani Penggarap
- d. Petani Pemilik dan Penggarap
- e. Ketua Kelompok tani

Adapun untuk mempermudah dalam penelitian ini, informan di pilih dari tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Sidenreng

Rappang yakni Kecamatan Watang Sidenreng, Kecamatan MaritengngaE dan Kecamatan Panca Rijang.

4.6 Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menjelaskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis dari sejumlah data kualitatif. Dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dinyatakan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan, tanggapan-tanggapan, serta tafsiran yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, untuk memperjelas gambaran hasil penelitian.

4.7 Definisi Operasional

Setelah beberapa konsep diuraikan dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Upaya Pemerintah daerah yang dimaksudkan adalah proses penentuan kebijakan- kebijakan dan pengaplikasiannya oleh pemerintah daerah sehubungan dengan tugas dan pelaksanaan peran pemerintah sebagai penentu kebijakan terkhusus di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produksi pertanian padi. Hal ini dapat dilihat dalam indikator- indikator:

1. Pelaksanaan peran pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rencana kebijakan-kebijakan dan penerapannya yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian.
 2. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang kepada masyarakat yang berkecimpung di bidang pertanian padi dalam bentuk sarana dan prasarana.
- b. Kondisi produksi pertanian padi yang dimaksudkan adalah gambaran mengenai fakta yang terjadi yang berkaitan dengan produksi pertanian padi di kabupaten Sidenreng Rappang, masalah apa yang kemungkinan terjadi dalam produksi pertanian padi ini, serta memberikan gambaran terhadap dampak dari upaya yang diberikan pemerintah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Letak geografis wilayah

Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dari 24 Kabupaten/Kotamadya dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Terletak kira- kira 180 Km sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan).

Kabupaten ini terletak diantara $3^{\circ}43' - 4^{\circ}09'$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}41' - 120^{\circ}10'$ Bujur Timur, letaknya berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Enrekang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Soppeng
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kota Pare Pare

4.1.2 Topografi dan iklim

Topografi wilayah terdiri dari dataran rendah, sampai berbukit dan bergunung dengan ketinggian 10 - 1.000 m dari permukaan laut. Curah hujan terjadi sepanjang tahun dengan rata-rata 1.450 mm. Suhu udara rata-rata 27° sehingga dengan kondisi demikian wilayah Kabupaten sebagian besar beriklim tropis dengan tipe A dan C (Schmidth dan Fergusson).

Berdasarkan sebaran curah hujan bulanan maka dikenal adanya dua musim tanam yaitu Musim Tanam Rendengan (Musim Hujan) jatuh pada April – September dan Musim Tanam Gadu (Musim Kemarau) jatuh pada bulan Oktober – Maret.

4.1.3 Tanah

Di Kabupaten Sidenreng Rappang terdapat beberapa jenis tanah antara lain yang mendominasi adalah jenis podzolik di Kecamatan Pitu Riase, jenis tanah lainnya seperti Aluvial Regusol, Grumosol dan Mediteran terdapat di seluruh kecamatan.

Jenis tanah pada masing-masing Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jenis Tanah per Kecamatan dalam Kabupaten Sidrap

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1	Panca Lautang	- Kompleks Mediteran Coklat Regosol & Latosol
2	Tellu LimpoE	- Alluvial Hidromorf - Alluvial Kekelabuan
3	Watang Pulu	- Alluvial Kelabu Tua - Alluvial Hidromorf - Regosol Coklat
4	Baranti	- Regosol Coklat Kelabuan - Gromosol Kelabu Tua - Regosol Coklat
5	Panca Rijang	- Alluvial Kelabu Tua - Regosol Coklat Kekelabuan
6	Kulo	- Podzolik Merah Kekuningan - Regosol Coklat Kekelabuan
7	MaritengngaE	- Podzolik Merah Kekuningan - Alluvial Kelabu Tua - Regosol Coklat Kekelabuan
8	Watang Sidenreng	- Grumosol Kekelabuan - Regosol Coklat Kekelabuan - Podzolik merah kekuningan
9	Pitu Riawa	- Alluvial Coklat Kekelabuan - Alluvial Coklat Kekelabuan
10	Dua PituE	- Alluvial Hidromorf - Alluvial Coklat Kelabu - Podzolik Merah Kekuningan
11	Pitu Riase	- Kompleks Podzolik Coklat Kekuningan dan Regusol - Alluvial Hidromorf - Kompleks Mediteran Coklat Kekelabuan dan Regusol - Podzolik Coklat - Podzolik Merah Kekuningan

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Tabel 4.2 Luas Baku Sawah menurut Pengairannya Tahun 2013
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KECAMATAN	IRIGASI (Ha)	TADAH HUJAN (Ha)	JUMLAH
1	Panca Lautang	3.146,00	890,20	4.036,20
2	Tellu LimpoE	1.534,00	893,00	2.427,00
3	Watang Pulu	3.140,000	436,40	3.576,40
4	Baranti	2.898,00	616,40	3.514,40
5	Panca Rijang	1.861,00	370,00	2.231,00
6	Kulo	946,00	2.170,00	3.116,00
7	MeritengngaE	5.241,00	110,00	5.351,00
8	Watang Sidenreng	6.342,00	290,00	6.632,00
9	Pitu Riawa	5.675,00	946,00	6.621,00
10	Dua PituE	5.281,00	-	5.281,00
11	Pitu Riase	2.062,00	111,00	2.173,00
	Jumlah	38.126,00	6.833,00	44.959,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Berdasarkan daftar baku sawah diatas, Kecamatan Watang Sidenreng memiliki baku sawah terluas yaitu 6.632,00 Ha atau 14,70% dari total baku sawah, yang terkecil yaitu Kecamatan Pitu Riase dengan luas 2.173,00 Ha atau 4,82%. Untuk sawah Irigasi yang terluas Kecamatan Watang Sidenreng yaitu 6.342,00 Ha atau 16,60% dari total lahan irigasi, dan yang terkecil adalah Kecamatan Kulo yaitu 946,00 Ha atau 2,48%.

Potensi sawah beririgasi sebagaimana dalam tabel diatas mempunyai sumber air dari bendungan :

1. Bendungan Saddang
2. Bendungan Bulu Timoreng
3. Bendungan Bulu Cenrana
4. Bendungan Bila

Lahan sawah yang beririgasi umumnya ditanami tiga kali dan dua kali setahun.

Tabel 4.3 Luas Sawah Ditanami tahun 2013

KECAMATAN	LAHAN SAWAH DITANAMI					
	1x	2x	3x	Tan. lain	Tidak di Tanami	Jumlah
Panca Lautang	-	2.175,20	1.749	-	112	4.036,20
Tellu LimpoE	-	2.397,00	30	-	-	2.427,00
Watang Pulu	-	2.535,40	954	87	-	3.576,40
Baranti	-	3.245,40	269	-	-	3.514,40
Panca Rijang	476	1.745,00	10	-	-	2.231,00
Kulo	-	2.668,00	448	-	-	3.116,00
MeritengngaE	100	5.251,00	-	-	-	5.351,00
Watang Sidenreng	20	6.557,00	30	25	-	6.632,00
Pitu Riawa	-	6.621,00	-	-	-	6.621,00
Dua PituE	-	5.281,00	-	-	-	5.281,00
Pitu Riase	-	2.062,00	111	-	-	2.173,00
Jumlah	596	40.537,00	3.602	112	112	44.959,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

4.1.4 Wilayah administratif

Wilayah Administratif Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883,25 Km² terdiri dari 11 Kecamatan dan 106 Desa/Kelurahan. Pembagian dalam kecamatan berdasarkan persentase luas wilayah adalah berturut-turut sebagai berikut:

Kecamatan Pitu Riase (44,84 %), Pitu Riawa (11,17 %), Panca Lautang (8,17 %), Watang Pulu (8,05%), Watang Sidenreng (6,40%), Tellu Limpoe (5,48%), Kulo (3,98%), Dua PituE (3,72), MaritengngaE (3,52%), Baranti (2,86%), dan Panca Rijang (1,80%).

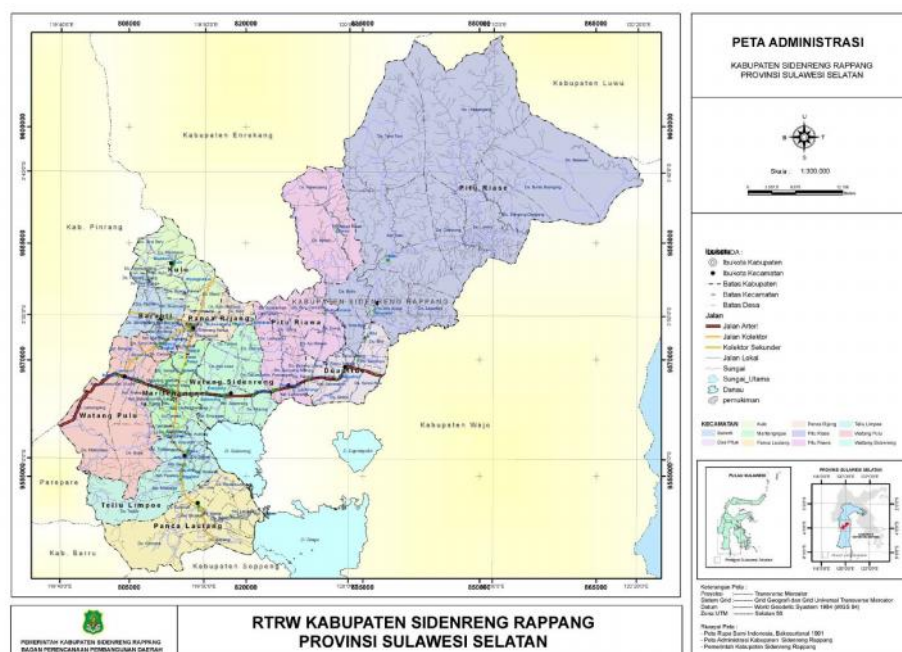
Gambaran administrasi pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang di sajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Nama, Luas Wilayah per kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan

Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas Wilayah Administrasi		Luas Wilayah Terbangun	
		Ha	(%) thd total	Ha	(%) thd total
Panca Lautang	10	15.393	8,17	266,75	6,46
Tellu LimpoE	9	10.320	5,48	261,05	6,36
Watang Pulu	10	15.131	8,03	356,85	8,69
Baranti	9	5.389	2,86	392,77	9,56
Panca Rijang	8	3.402	1,81	401,25	9,77
Kulo	6	7.500	3,98	221,05	5,38
MaritengngaE	12	6.590	3,50	547,50	13,33
Watang Sidenreng	8	12.081	6,41	402,15	9,79
Pitu Riawa	10	6.999	3,72	425,30	10,35
Dua PituE	12	21.043	11,17	401,10	9,77
Pitu Riase	12	84.477	44,84	431,75	10,51
TOTAL	106	188.325	100,00	4.107,52	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang



4.1.5 Penduduk dan organisasi

a. Penduduk

Jumlah penduduk dalam Kabupaten Sidenreng Rappang menurut jenis kelamin tercantum pada tabel berikut :

Tabel 4.5 Jumlah penduduk Per Kecamatan menurut Jenis Kelamin Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN LAKI-LAKI	JENIS KELAMIN PEREMPUAN	JUMLAH	KEPADATAN JIWA/Km ²
1	Panca Lautang	8.316	8.925	17.241	112
2	Tellu LimpoE	10.761	11.967	22.278	220
3	Watang Pulu	14.846	15.282	30.128	199
4	Baranti	13.527	14.541	28.068	520
5	Panca Rijang	13.032	14.054	27.086	796
6	Kulo	5.511	5.834	11.345	151
7	MeritengngaE	22.295	23.844	46.139	700
8	Watang Sidenreng	8.346	8.705	17.051	141
9	Pitu Riawa	12.277	12.703	24.980	118
10	Dua PituE	13.216	14.053	27.272	389
11	Pitu Riase	9.973	9.900	19.873	23
	Jumlah	132.103	139.808	271.911	144

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, 2013

b. Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Keberadaan kelompok UPJA adalah untuk mendayagunakan alsintan milik pemerintah maupun swadaya petani sendiri dalam

rangka memberikan pelayanan jasa alsintan kepada seluruh petani/kelompok tani yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang dan sekitarnya.

Nama dan lokasi kelompok UPJA tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Inventarisasi Nama dan Kelompok UPJA Tahun 2013

No	Nama UPJA	Lokasi		Nama Ketua
		Kecamatan	Desa	
1	MassumpuloloE I	Panca Rijang	Bulo	Masri Ibrahim
2	PanasaE	Panca Rijang	Bulo	M. Natsir
3	Bambu Runcing	Panca Rijang	Rappang	Arifuddin, Moni
4	MappasitujuE	Kulo	Abbokongeng	Adiyatma
5	MattirowaliE	M.TengngaE	Rijang Pitu	La Bidin
6	MaritengngaE I	M.TengngaE	Lakessi	Abdullah
7	Palia	Wt. Pulu	Lawowoi	Bakkareng
8	MasagenaE	Wt. Sidenreng	TalumaE	Arifin
9	SukkuruE	Wt. Sidenreng	Sidenreng	H. Andaliang
10	MaccolliloloE	Wt. Sidenreng	Kanyuara	La Badi
11	Polewali	Tellu LimpoE	Arateng	Abd. Hafid
12	Massappa	Pitu Riawa	Otting	Baharuddin
13	Mannennungeng I	Wt. Pulu	Carawali	Halede
14	Pammasepuang	Pitu Riawa	AjubissuE	M. Basir
15	Taccimpo	Dua PituE	Taccimpo	Udin
16	Kalosi Alau	Dua PituE	Kalosi Alau	Abd. Rahim, ST
17	Sipammase-Mase	Dua PituE	Taccimpo	Walle
18	Cenrana	Dua PituE	Salobukkang	Hamzah
19	Celengeng Riase	Panca Lautang	Alesalewoe	Ammade
20	Sipatuo Deceng	Pitu Riase	Botto	Hadu. P
21	Mammninasae	Pitu Riase	Bola Bulu	Abd. Kadir
22	Patongai	Baranti	Duampanua	La Umma
23	SamaturuE	Kulo	Abbokongeng	Arsalam
24	Akbar	Panca Lautang	Lise	Mahmud
25	Kareba	Panca Lautang	Lise	Jayadi
26	Amessageng	Panca Rijang	Lalebata	Drs. Abubakar
27	SabbaraE	Wt. Sidenreng	TalumaE	Lataing
28	Tipu Minasa	Pitu Riawa	Lancirang	Laba
29	Riska	Baranti	Baranti	Abdullah laserang
30	Mannennungeng II	Wt. Pulu	Lawowoi	Abd. Malik Ali
31	Sipodeceng	Pitu Riase	Botto	Anwar
32	Sipatuwo	Wt. Sidenreng	Talumae	Abbas

c. Kelompok tani

Jumlah Kelompok Tani dalam binaan Sektor Pertanian adalah 1.169 kelompok dan Gabungan kelompok tani sebanyak 106.

Tabel 4.7 Perkembangan Gapoktan dan Poktan tahun 2013

NO	KECAMATAN	GAPOKTAN	POKTAN	JUMLAH ANGGOTA
1	Panca Lautang	10	116	4.547
2	Tellu LimpoE	9	116	5.463
3	Watang Pulu	10	190	6.180
4	Baranti	9	126	10.926
5	Panca Rijang	8	133	4.335
6	Kulo	6	140	4.689
7	MeritengngaE	12	124	5.168
8	Watang Sidenreng	8	215	9.813
9	Pitu Riawa	12	216	8.538
10	Dua PituE	10	138	7.892
11	Pitu Riase	12	179	7.172
	Total	106	1.693	74.723

Sumber : Badan Ketahanan Pangan dan Penyeluh, 2013

4.1.6 Tata ruang wilayah

A. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan dari penataan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah “Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang Yang Maju Dan Sejahtera Dengan Berbasis Pada Pembangunan

Agribisnis Modern yang Didukung Oleh Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Yang Tinggi”.

Wujud ruang wilayah yang mendukung perkembangan agribisnis modern diharapkan dapat meningkatkan minat investasi, selain juga untuk mengakomodasi dampak perkembangan di wilayah sekitar seperti Kota Parepare, Kabupaten Enrekang dan Pinrang, Kabupaten Soppeng dan Kabupaten, serta Kabupaten Wajo yang diharapkan akan memicu pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ruang yang mendukung pertanian selain dari pertimbangan sosial budaya dan potensi geofisik wilayah, juga seiring untuk mendukung keseimbangan ekologis yang berkelanjutan. Adanya sinergi dengan sektor lainnya (hulu dan hilir) diharapkan meningkatkan nilai tambah pertanian sekaligus mengangkat perekonomian yang lebih merata dalam lingkup wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pengembangan potensi wisata alam baik yang sudah berkembang maupun yang belum dioptimalkan perkembangannya ditunjang pertumbuhannya melalui pengaturan ruang serta pendukungnya terutama aspek sarana prasarana dan manajerialnya.

Dengan demikian, maka tujuan dari penataan ruang dalam Revisi RTRW Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki beberapa

kata kunci utama yang selanjutnya akan menjiwai penyusunan Perda Tata Ruang Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai payung kebijakan spasial.

B. Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang membahas mengenai kebijakan dan strategi penataan struktur ruang wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah kabupaten, serta kebijakan dan strategi penetapan kawasan strategis wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kebijakan Dan Strategi Kependudukan

1. Kebijakan Kependudukan

- a) Penataan dan penyebaran penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b) Peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Strategi Kependudukan

- a) Menata administrasi kependudukan.
- b) Memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

- c) Meningkatkan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai dengan kualitas yang prima.
- d) Meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang

Penentuan Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk meningkatkan keserasian ruang. Kebijakan dan strategi penetapan struktur ruang ini meliputi strategi terkait dengan : sistem perdesaan, sistem perkotaan, fungsi wilayah, serta sistem jaringan prasarana wilayah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Kebijakan pengembangan struktur ruang dilakukan melalui :
 - a) Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata.
 - b) Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong iklim investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat melalui pengembangan dan penyediaan prasarana transportasi,

telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

2. Strategi Pembentukan pusat pelayanan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata dilakukan melalui :
 - a) Meningkatkan interaksi antara pusat kegiatan perdesaan dan perkotaan secara berjenjang.
 - b) Mengembangkan perkotaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai pusat pelayanan sosial - ekonomi bagi area yang lebih luas.
 - c) Pengembangan fungsi kawasan peruntukan industri besar di kawasan Watang Pulu.
 - d) Mengembangkan fungsi kawasan perdesaan sesuai potensi wilayah, yakni perdesaan terletak di kawasan pegunungan untuk hutan lindung, hutan produksi, perkebunan dan hortikultura, perdesaan di dataran rendah untuk pertanian pangan, dan perdesaan.
 - e) Meningkatkan nilai tambah produk pertanian dengan pengolahan hasil, serta pengembangan sistem agribisnis pada kawasan potensial.

f) Mengembangkan kawasan wisata sebagai andalan pengembangan perdesaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Strategi penyediaan prasarana wilayah dilakukan melalui :

a) Mengembangkan sistem transportasi darat melalui pengembangan jalan antara Kota Parepare – Kabupaten Sidenreng Rappang – Kabupaten Wajo / pengembangan jalan Arteri primer, rencana pembangunan jalan lingkar kota serta jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak terletak di jalan arteri maupun kolektor guna mendukung perkembangan industri, pertanian dan pariwisata.

b) Mengembangkan prasarana transportasi darat dengan upaya pemeliharaan dan peningkatan terminal tipe C pada beberapa terminal yang tersebar di wilayah perencanaan yang berpotensi sebagai sumber bangkitan dan tarikan lalulintas.

c) Pengembangan dan penyediaan tower BTS (*Base Transceiver Station*) yang digunakan oleh banyak provider secara bersama-sama dan menjangkau ke pelosok

perdesaan guna mendukung iklim investasi dan pemasaran di bidang industri dan pariwisata.

- d) Mengembangkan sumber daya pengairan dengan peningkatan sistim jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air, serta pengembangan dalam, cekdam dan embung pada kawasan potensial guna pengembangan sektor pertanian.
- e) Mengembangkan sistem jaringan energi dengan peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok pedesaan yang belum terlayani dan terisolir, serta pengembangan sistem penyediaan setempat melalui mikro hidro dan *Bio-Mass Energy* guna mendukung pertumbuhan wilayah dan peningkatan investasi di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- f) Mengembangkan prasarana lingkungan dengan optimalisasi tingkat penanganan sampah pedesaan dan perkotaan melalui pengelolaan sampah berkelanjutan dan mendukung pertanian misalnya menjadikan sampah hasil pertanian sebagai bahan baku kompos, pengembangan TPA, serta melakukan upaya *reduce, reuse* dan *recycle*(3R) terhadap timbunan sampah dan limbah secara terpadu.

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah terdiri atas penetapan kawasan lindung dan budidaya meliputi:

a) Pemantapan fungsi kawasan lindung yang mencakup kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan pada kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, kawasan rawan bencana alam dan kawasan lindung lainnya dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya; serta

b) Pengembangan kawasan budidaya melalui optimasi fungsi kawasan pada kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan dan objek pariwisata, kawasan permukiman, kawasan eksploitasi sumber daya air dan mineral serta ruang terbuka hijau (RTH) dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat

2. Strategi pengembangan kawasan lindung meliputi:

a) Memantapkan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya sebagai hutan lindung

dan kawasan resapan air dengan pelarangan melakukan kegiatan budidaya yang dapat mengganggu fungsi lindung dan pengembalian fungsi pada kawasan yang telah mengalami kerusakan, melalui penanganan secara teknis dan vegetatif dengan pelibatan peran serta dari masyarakat sekitar kawasan.

- b) Mengembangkan dan pemantapan kawasan perlindungan setempat dengan pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sepanjang sungai, sekitar DAM, Cekdam, embung dan mata air, dibatasi untuk kepentingan pariwisata dengan pengamanan kawasan dan mengutamakan vegetasi sedangkan dan penggunaan fungsional seperti pariwisata, permukiman diijinkan dengan memperhatikan kaidah lingkungan.
- c) Mengembangkan dan pemantapan kawasan pelestarian alam hanya diperuntukkan bagi kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian kawasan diantaranya memelihara habitat dan ekosistem khusus yang ada dan sifatnya setempat yang nantinya dapat meningkatkan nilai dan fungsi kawasan dengan menjadikannya sebagai tempat wisata, objek penelitian, kegiatan pecinta alam yang pelaksanaan dan pengelolaannya secara bersama.

d) Mengembangkan dan penanganan kawasan rawan bencana alam dengan menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana alam banjir, longsor, angin ribut sebagai kawasan terbangun, peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana angin ribut dan banjir, pengembangan bangunan yang dapat meminimasi terjadinya bencana pengembangan bangunan tahan gempa pada daerah terindikasi rawan gempa.

3. Strategi pengembangan kawasan budidaya meliputi:

a) Mengembangkan hutan produksi, dengan pengembangan hutan yang bernilai ekonomi tinggi tetapi tetap memiliki fungsi perlindungan kawasan dengan melakukan peningkatan nilai tambah kawasan melalui penanaman secara bergilir, tebangan pilih dan pengelolaan bersama masyarakat; pada kondisi khusus dimana akan dilakukan alih fungsi maka harus dilakukan pengganti lahan setidaknya tanaman tegakan tinggi tahunan yang berfungsi untuk menggantikan fungsi hutan.

b) Mengembangkan kawasan pertanian dilakukan melalui: penetapan dan pengendalian secara ketat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan intensifikasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, pengembangan

sentra produksi dan agribisnis, pengembangan hortikultura dengan pengolahan hasil pertanian dan melakukan upaya ekspor serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian.

- c) Mengembangkan kawasan perkebunan dilakukan melalui pengembalian lahan yang rusak atau alih komoditas menjadi perkebunan, peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta pengembangan kemitraan dengan masyarakat yang tinggal disekitar perkebunan.
- d) Mengembangkan kawasan peternakan melalui pengembangan dan pengelolaan hasil peternakan dengan industri peternakan yang ramah lingkungan yang didukung dengan adanya pengembangan cluster sentra produksi peternakan terutama terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak.
- e) Mengembangkan kawasan pertambangan dilakukan melalui penetapan kawasan pertambangan sesuai dengan jenis bahan galian, pengembangan kawasan pertambangan yang sudah ada dan melakukan rehabilitasi kawasan bekas pertambangan sesuai dengan dokumen AMDAL yang menyertainya.

- f) Mengembangkan kawasan peruntukan industri melalui pengembangan dan pemberdayaan industri kecil dan *home industry* untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, yang diikuti dengan peningkatan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta pengadaan prasarana wilayah pada kawasan Pitu Riawa yang telah ditetapkan sebagai kawasan untuk peruntukan Agro Industri Moderen untuk menarik investasi.
- g) Mengembangkan kawasan pariwisata melalui pengembangan obyek wisata andalan prioritas berbasis alam; membentuk zona wisata yang dikaitkan dengan kalender wisata dalam skala nasional dengan disertai pengembangan paket wisata, pengadaan kegiatan festival wisata atau gelar seni budaya yang didukung oleh pemasaran hasil industri kecil kerajinan hasil pertanian dan hasil pengolahan produksi pertanian.
- h) Mengembangkan kawasan permukiman dengan pengembangan permukiman perdesaan yang disesuaikan dengan karakter fisik, sosial-budaya dan ekonomi masyarakat perdesaan yang didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perdesaan dan peningkatan kualitas permukiman perkotaan serta pengembangan perumahan terjangkau dan layak huni.

- i) Mengembangkan kawasan eksploitasi sumber daya air dan mineral melalui pelestarian daerah di sekitar kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral dengan melakukan reboisasi di daerah sekitarnya untuk menjaga agar siklus daur hidrologi berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat mempertahankan debit air yang ada serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat sekitar untuk menjaga kawasan eksploitasi sumberdaya air dan mineral agar tidak terjadi pencemaran terhadap kualitas dan kebersihan air tersebut.

- j) Mengembangkan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) dengan penetapan kawasan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan minimal 30 % dari luas wilayah perkotaan akan tetapi proporsi RTH privat dapat berbeda pada kawasan-kawasan yang ditetapkan sangat strategis, bernilai lahan sangat tinggi, dan atau pada kawasan-kawasan yang berfungsi sebagai kawasan penyangga atau kawasan lindung atau berfungsi konservasi maka komposisi Ruang Terbuka Hijau yang dipersyaratkan sebagai komposisi penyediaan RTH privat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku sesuai dengan fungsinya.

Kebijakan dan Strategi Penetapan Kawasan Strategis Wilayah
Kabupaten Sidenreng Rappang

1. Pengembangan kawasan sesuai fungsi masing-masing dalam mendukung fungsi pertahanan dan keamanan, pengembangan ekonomi wilayah, dan lingkungan hidup guna mewujudkan Kabupaten Sidenreng Rappang yang lestari dan berdaya saing tinggi.

2. Strategi pengembangan kawasan strategis ini meliputi :

- a) Mengembangkan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi pengembangan kawasan industri di Kecamatan Pitu Riawa yang ditunjang dengan pengembangan kawasan Agroindustri Modern.
- b) Mengembangkan fungsi lindung pada kawasan sosio-kultural melalui upaya peningkatan pemanfaatan Makan Andi Cammi dan Peninggalan Sejarah di Watang Sidenreng dan Panarukan untuk penelitian, pendidikan dan pariwisata dan pengendalian perkembangan kegiatan di sekitarnya.
- c) Mengembangkan kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pendayagunaan sumber daya alam dilakukan dengan pengembangan kawasan pendayagunaan sumber daya alam berdasarkan lokasi sumberdaya alam strategis

Danau Sidenreng dan Kawasan Industri dan Pergudangan di wilayah perbatasan dengan Kota Parepare yang masuk dalam batas administrasi Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.2 Upaya Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Produksi Pertanian Padi di Kabupaten Sidenreng Rappang

Peningkatan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang sangat erat kaitannya dengan aspek kebijakan sarana dan prasarana produksi, diantaranya pengadaan dan distribusi benih dan pupuk, serta dukungan pembiayaan usaha tani dalam hal ini program bersubsidi. Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai perangkat daerah yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011,2012,2013, dan 2014 adalah dengan mengadakan program Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) untuk padi hibrida dan non hibrida yang sekarang berganti nama menjadi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) yang mana

dalam programnya menggunakan teknologi (benih unggul, jarak tanam, dan penggunaan pupuk berimbang), dan Optimasi Lahan. Pola SRI yakni cara bertanam padi kembali ke alam, artinya petani tidak lagi menggunakan pupuk kimia, tapi menggunakan bahan-bahan alami/memanfaatkan jerami, limbah gergaji, sekam dan pupuk kandang dengan salah satu komponen teknologi adalah tanaman bibit muda, yakni 7 sampai dengan 12 hari. SLPTT merupakan bentuk sekolah yang seluruh proses belajar-mengajarnya dilakukan di lapangan, yang dilaksanakan di lahan petani peserta PTT dalam upaya peningkatang produksi padi nasional.

Selain itu adapula program pemerintah pada kegiatan APBD tahun 2012 dalam hal peningkatan produksi pertanian diantaranya pembinaan dan peningkatan keterampilan/kemampuan petani, pembinaan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian serta operasional pengendalian hama dan penyakit. Hal ini di ungkapkan oleh kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap bapak Ir. Amiruddin,MS bahwa :

“...upaya pemerintah adalah program SLPTT (untuk padi hibrida dan non hibrida) yang sekarang menjadi GPPTT. Terus yang kedua adalah optimalisasi lahan berupa bantuan sarana produksi dalam hal ini pupuk, benih, pestisida, biaya pengolahan tanah,alsinta, traktor, ada juga yang dinamakan pola kerik yang ada traktornya yang diberi tiap kelompok tani...”

(Wawancara, 11 Februari 2015)

Adapun prosedur untuk memperoleh pupuk dan benih bersubsidi ini dimulai dengan mengajukan CPCL(Calon Petani Calon Lokasi) yang diajukan di provinsi, lalu nantinya provinsi yang mengajukan ke pusat. Dari pengumpulan itu , turunlah jumlah kuota perolehan Kabupaten Sidenreng Rappang. Terkhusus untuk pupuk subsidi ini ada dua pabrikan yakni Petrokimia dan Pupuk Kaltim. Pabrikan ini nantinya menunjuk distributor. Jumlah distributor di Kabupaten Sidenreng Rappang yakni 6 atau 7, Distributor inilah nantinya yang menunjuk beberapa pengecer yang ada di tingkat desa, Adapun fungsinya yakni untuk melayani pendataan subsidi. Sedangkan untuk benih padi pelaksananya adalah Sang Hyang Seri. Adapun pembagian untuk pupuk dan benih ini dilihat dari luasan tiap kelompok tani serta dengan penilaian-penilaian tertentu seperti belum pernah mendapat bantuan, sanggup melaksanakan program pemerintah, dan keaktifan petani dalam kelompok.

Selain itu setiap tahunnya pemerintah mengadakan kegiatan Tudang Sipulung yang dihadiri oleh pihak dari pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, petani, dan beberapa stake holder lainnya. Tujuan tudang sipulung ini sebagai media untuk menetapkan waktu tanam, jenis varietas yang dipakai, cara-cara pemberantasan hama/penyakit. Peran pemerintah sebagai pemberi motivasi dan mengumpulkan kelompok tani tiap kecamatan yang nantinya akan mengajukan usulan-usulan kemudian membuat laporan. Apabila

ada petani yang melanggar dari kesepakatan maka tidak ada sanksi khusus yang diberikan.

4.2.1 Lahan

Penyediaan lahan merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam peningkatan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Lahan ini nantinya akan diproses agar bisa dimanfaatkan sebagai sawah. Adapun persyaratan pengadaan sawah baru (cetak sawah) ini minimal 10 hektar dan lahannya saling berdekatan. Tentunya peran pemerintah dalam pengadaan sawah ini dalam bentuk pembiayaannya. Ada pula yang swadaya (lahan yang dimiliki sendiri oleh masyarakat) harus berkoordinasi dengan pihak setempat sehingga lahan yang mereka miliki dapat ditentukan lahan mereka masuk pada kelompok tani yang mana dengan mempertimbangkan batas-batas seperti perumahan, sungai, dan sebagainya. Tidak hanya pengadaan sawah sering pula terjadi pengurangan sawah yang disebabkan alih fungsi lahan, seperti pembangunan jalan tani, tapi untuk sekarang ini berdasarkan edaran dari pemerintah agar pengalihan fungsi lahan khususnya lahan-lahan yang produktif dapat diminimalisir. Hal ini diungkapkan oleh bapak Rustam selaku Pemimpin Pertanian Kecamatan (PPK) Watang Sidenreng bahwa :

“...pengadaan sawah baru (cetak sawah) minimal 10 hektar dan saling berdekatan yang dibiayai oleh pemerintah. Ada pula yang swadaya dengan berkoordinasi di pihak setempat sehingga bisa ditentukan

dia masuk kelompok tani yang mana dengan mempertimbangkan batas-batas seperti perumahan, sungai dsb. Ada juga pengurangan sawah yang disebabkan alih fungsi lahan, seperti pembangunan jalan tani, tapi sekarang ada edaran dari pemerintah diusahakan tidak ada pengalihan fungsi lahan yang produktif...”

(Wawancara, 06 Februari 2015)

Pada tahun 2012, banyak upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten dalam hal perluasan sawah dalam rangka peningkatan produksi padi. Kegiatan ini dilakukan di beberapa desa di antaranya Bulu Cenrana, Sumpang Mango, Ponrangae, Otting, Ana Banna, Damai, Mojong, Botto, serta Desa Kalosi. Kegiatan perluasan sawah ini tidak hanya dibiayai oleh petani itu sendiri melainkan beberapa desa mendapat anggaran dari APBN. Berikut tabel perluasan sawah pada tahun 2012 :

Tabel 4.8 Kegiatan Perluasan Sawah Tahun 2012

N O	NAMA KELOMPOK TANI	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS (Ha)	Ket
1	Soppo Batu	Bulu Cenrana	Pitu Riawa	48	APBN
2	Lapajikki	Bulu Cenrana	Pitu Riawa	25	APBN
3	Lapilajang	Sumpang Mango	Pitu Riawa	20	APBN
4	Mamminasa I	Ponrangae	Pitu Riawa	15	APBN
5	Suka Bumi	Ponrangae	Pitu Riawa	25	APBN
6	Padaidi	Ponrangae	Pitu Riawa	16	APBN
7	Lamanyameng II	Otting	Pitu Riawa	27	APBN
8	Isi Alam	Ana Banna	Pitu Riawa	20	APBN
9	Jeruk Manis A	Damai	Wt. Sidenreng	12	APBN
10	Sampi Sadae	Mojong	Wt. Sidenreng	40	APBN
11	Petta Siang	Damai	Wt. Sidenreng	19	APBN
12			Wt. Sidenreng	57	Swadana Petani
13			Panca Rijang	10	Swadana Petani
14	Abadi	Botto	Pitu Riase	18	APBN
15	Pulau Batam	Kalosi	Dua Pitue	16	APBN
16			Baranti	12	Swadana Petani
	Jumlah			380	

Adapun kesepakatan pengolahan lahan sebelum penanaman yakni persiapan lahan untuk pertanaman mirip dengan lahan untuk persemaian, yakni tanah diolah secara sempurna yaitu dibajak I, digenangi selama 2 hari, lalu dikeringkan selama 7 hari, lalu dibajak II, digenangi selama 2 hari dan dikeringkan lagi selama 7 hari. Terakhir tanah digaru untuk melumpurkan dan meratakan tanah. Untuk menekan pertumbuhan gulma, lahan yang telah diratakan disemprot dengan herbisida pra-tumbuh dan dibiarkan selama 7-10 hari atau sesuai dengan anjuran.

4.2.2 Penanaman

Penanaman dilakukan pada saat bibit berumur 15-21 hari, dengan 1 bibit per lubang. Bibit yang ditanam sebaiknya memiliki

umur fisiologi yang sama (dicirikan oleh jumlah daun yang sama, misal 2 atau 3 daun/batang). Jarak tanam dapat menggunakan sistem tegel (20 x 20 cm atau 25 x 25 cm atau 27x27 cm) dan/atau sistem legowo-2 (20x10x40 cm atau 25x12,5x50 cm atau 27x13,5x50 cm) tergantung tinggi tempat, kesuburan lahan dan varietas yang ditanam. Bibit ditanam pada kedalaman 1-2 cm. Sisa bibit yang telah dicabut diletakkan di bagian pinggir petakan, nantinya digunakan untuk menyulam. Penyulaman dilakukan pada 7 hari setelah tanam (HST) dengan bibit dari varietas dan umur yang sama. Setelah ditanam, air irigasi dibiarkan macak-macak (1-3 cm) selama 7-10 hari.

Adapun sebelum dilakukannya proses penanaman ini, jauh hari sebelumnya telah ada kesepakatan antara pihak pemerintah dan para petani serta tokoh-tokoh masyarakat tentang waktu penanaman. Hal ini disepakati dalam kegiatan tudang sipulung yang diselenggarakan setiap tahunnya.

4.2.3 Benih

Dalam suatu sistem produksi pertanian baik ditujukan untuk memenuhi konsumsi sendiri maupun yang berorientasi komersial diperlukan adanya ketersediaan benih dengan varietas yang berdaya hasil tinggi serta mutu yang baik. Daya hasil yang tinggi serta mutu yang terjamin pada umumnya terdapat pada varietas unggul. Namun manfaat dari suatu varietas akan dirasakan oleh

petani atau konsumen apabila benih tersedia dalam jumlah yang cukup dengan harga yang sesuai. Dengan demikian, dalam pertanian modern, benih berperan sebagai delivery mechanism yang menyalurkan keunggulan teknologi kepada clients (petani dan konsumen lainnya).

Untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi harus dimulai dengan penanaman benih bermutu, yaitu benih yang menampakkan sifat-sifat unggul dari varietas yang diwakilinya. Kemurnian suatu varietas secara berangsur-angsur bisa hilang karena tercampur benih varietas lain. Dalam sistem pengadaan dan distribusi, mutu suatu benih dapat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : (1) sistem produksi, (2) pengolahan hasil, (3) penyimpanan hasil, dan (4) penanganan selama distribusi benih.

PT. Sang Hyang Seri (SHS) merupakan pemasok terbesar kebutuhan benih di Kabupaten Sidrap. Namun, eksistensi pasar benih padi ini masih lemah, karena sebagian besar petani masih memproduksi benih sendiri untuk keperluan usahatannya. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Abd. Rahim bahwa:

“...kalau benih itu di dapat di PT. Sang Hyang Seri, tapi kendalanya benihnya tidak selalu ada. Jadi terpaksa yang dipakai itu benih sendirimi dari hasil panen sebelumnya dan tentunya itu berpengaruh sama produksinya karena kualitasnya kurang bagus dari pada yang di beli dari Sang Hyang Seri itu...”

(Wawancara, 06 Februari 2015)

Sistem pengadaan dan distribusi benih meliputi berbagai aspek yang saling terkait dan mencakup berbagai kegiatan yang dimulai dari inovasi penemuan jenis/verietas unggul baru sampai dengan diadopsinya benih unggul tersebut oleh petani. Upaya mendukung kelancaran sistem pengadaan dan distribusi benih diperlukan berbagai upaya peningkatan dan pengembangan secara kontinu, yaitu mulai dari penelitian dan pengembangan varietas, penilaian dan pelepasan varietas, serta produksi, pengolahan dan distribusi benih, pengawasan mutu dan sertifikasi benih, pengembangan kelembagaan dan sumberdaya manusia yang melibatkan institusi pemerintah, semi pemerintah/BUMN, koperasi dan swasta.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang biaya pokok benih dari PT.SHS adalah sebesar Rp 8.500/kg kemudian mendapat subsidi dari pemerintah sehingga harnyanya menjadi Rp 2.300/kg. Adapun cara memperoleh benih itu sendiri yakni dengan mengumpulkan nama atau jumlah anggota kelompok tani beserta luas sawah yang dimiliki kemudian menjumlah berapa jumlah benih yang mereka butuhkan. Hal ini dikarenakan bantuan yang diperoleh tidak secara individu melainkan pemberian ke tiap-tiap kelompok tani.

4.2.4 Sarana

Bentuk upaya pemerintah dalam hal pengairan yakni dalam program penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana

seperti pengelolaan air irigasi dan penyediaan pompa air. Selain itu ada pula program pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan APBN (Tugas Pembantuan) pada tahun 2012 yakni penyediaan alat mesin pertanian. Berikut data kelompok tani yang menerima bantuan tersebut:

Tabel 4.9 Nama-nama Kelompok Tani Penerima Manfaat Bansos
Tahun Anggaran 2012

N O	Kegiatan	Alamat		Nama Kelompok	Ket
		Desa/Kel	Kecamatan		
1	Pengelolaan air irigasi	Bila Riawa	Dua Pitue	Maddeppngeng	APBN-P
2	Pengelolaan air irigasi	Arawa	Wt. Pulu	Sibaliresoe	APBN-P
3	Pengelolaan air irigasi	Sipodeceng	Baranti	Sigadis-gadis	APBN-P
4	Pengelolaan air irigasi	Bulo Wattang	Panca Rijang	Samaturue	APBN-P
5	Pengelolaan air irigasi		Rijang Panua	Ajoa	APBN-P
6	Pengelolaan air irigasi	Mario	Kulo	Bulu Cengkeh	APBN-P
7	Pengelolaan air irigasi	Kulo	Kulo	Jembatan	APBN-P
8	Pengelolaan air irigasi	Abbokongeng	Kulo	LeppeE	APBN-P
9	Pengelolaan air irigasi	Maddenra	Kulo	Darapae	APBN-P
10	Pengelolaan air irigasi	Bina Baru	Kulo	Salotengae	APBN-P
11	Pengelolaan air irigasi	Sidenreng	Wt. Sidenreng	MalomoE	APBN-P
12	Pengelolaan air irigasi	Talawe	Wt. Sidenreng	Maddenuang	APBN-P
13	Pengelolaan air irigasi	Kalmpale	Dua Pitue	MakkaritutuE	APBN-P
14	Pengelolaan air irigasi	Kampale	Dua Pitue	Salokea	APBN-P
15	Pengelolaan air irigasi	Lancirang	Pitu Riawa	Masagenae	APBN-P
16	Pengelolaan air irigasi	Botto	Pitu Riase	Sipakaenre II	APBN-P
17	Pompa Air	Arawa	Wt.Pulu	Patommo	
18	Pompa Air	Tonrong	Baranti	Beringin	
19	Pompa Air	Mario	Kulo	Mario Jaya	
20	Pompa Air	Kanie	MaritengngaE	Temalengkang	
21	Traktor	Talawe	Wt. Sidenreng		

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

4.2.5 Pemeliharaan

a. Pemupukan

Kesuburan tanah beragam antar lokasi karena perbedaan sifat fisik dan kimianya. Dengan demikian kemampuan tanah untuk menyediakan hara bagi tanaman juga berbeda-beda. Pemupukan dimaksudkan untuk menambah penyediaan hara sehingga mencukupi kebutuhan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi dengan baik. Agar efisien, takaran pupuk hendaknya disesuaikan dengan kondisi lahan setempat. Untuk pupuk SP36 dan KCl, takarannya disesuaikan dengan ketersediaan P dan K dalam tanah. Sedangkan untuk pupuk urea, takaran dan waktu pemberiannya disesuaikan dengan kebutuhan tanaman dengan menggunakan teknologi Bagan Warna Daun (BWD).

Penggunaan pupuk tentunya sangat berperan penting agar produksi padi terus meningkat. Untuk itu pemerintah mengadakan program pupuk bersubsidi. Selain itu ada pula bantuan berupa kegiatan pemberdayaan seperti sekolah lapang. Dari kegiatan itu petani yang ikut dalam kegiatan itu akan mendapatkan pupuk untuk kelompok taninya, kemudian pupuk itu dibagi kepada anggota kelompok tani berdasarkan luas sawah yang digarap seperti yang didapatkan oleh bapak Anton dari kelompok tani Serayu Satu di Kecamatan MaritengngaE yang pernah ikut dalam kegiatan tersebut. Setelah mengikuti kegiatan itu, ia memdapatkan

pupuk dengan pembagian tiap anggota kelompok tani sebanyak 150 Kg/Hektar.

Penggunaan pupuk pada musim tanam 2012 diantaranya pupuk urea, TSP/SP-36, ZA, NPK dan Organik. Realisasi penggunaan pupuk paling banyak pada tahun 2012 adalah pupuk urea sebanyak 20.859.777. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Realisasi Penggunaan Pupuk pada Musim Tanam Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	URAIAN	MUSIM TANAM 2011/2012 (Kg)	MUSIM TANAM 2012 (Kg)	TAHUN 2012 (Kg)
1	Urea	10.663.059	10.196.718	20.859.777
2	TSP/SP-36	4.013.269	3.552.707	7.565.976
3	KCL	-	-	-
4	ZA	1.987.250	1.926.767	3.914.017
5	NPK	5.122.290	6.141.288	11.263.578
6	Organik	6.939.240	8.343.864	15.283.104
		28.725.108	30.164.344	58.889.452

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Penggunaan pupuk pada musim tanam 2013 diantaranya pupuk urea, TSP/SP-36, ZA, NPK dan Organik. Sama halnya pada tahun 2012, pada tahun 2013 penggunaan pupuk terbanyak adalah pupuk urea. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.11 Realisasi Penggunaan Pupuk pada Musim Tanam Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	URAIAN	MUSIM TANAM 2012/2013 (Kg)	MUSIM TANAM 2013 (Kg)	TAHUN 2013 (Kg)
1	Urea	10.264,05	10.141,10	20.405,15
2	TSP/SP-36	1.539,00	882,00	2.421,00
3	KCL	-	-	-
4	ZA	1.221,50	940,00	2.161,50
5	NPK	1.771,20	3.678,15	5.449,35
6	Organik	1.462,00	5.805,90	7.267,90
		16.257,75	21.447,15	37.704,90

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

b. Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman)

Hama dan penyakit merupakan faktor penting yang menyebabkan suatu varietas tidak mampu menghasilkan varietas seperti yang diharapkan. Pengendalian hama dan penyakit harus dilakukan secara terpadu. Hama wereng coklat dan penyakit tungro merupakan hama dan penyakit yang paling utama saat ini. Untuk itu di dalam pengembangan atau pertanaman produksi benih supaya berhasil beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Hindari pengembangan di daerah endemis hama dan penyakit terutama daerah endemis wereng coklat dan penyakit tungro. Bila pengembangan dilakukan di daerah endemis hama dan penyakit, terapkan PHT dengan monitoring keberadaan tungro dan kepadatan populasi wereng hijau secara intensif. Perhatikan juga serangan tikus sejak dini dan monitor penerbangan ngengat penggerek batang.

2. Pengamatan populasi wereng coklat dilakukan pada 20 rumpun tanaman secara diagonal. Hitung jumlah wereng coklat + wereng punggung putih, predator (laba-laba, *Opionea*, *Paederus* dan *Coccinella*) dan kepik *Cyrtorhinus*.
3. Penggunaan insektisida didasarkan pada jumlah wereng terkoreksi dan umur tanaman, yaitu apabila :

Wereng terkoreksi (nilai D) lebih dari lima ekor pada saat tanaman berumur kurang dari 40 HST, atau lebih dari 20 ekor pada saat tanaman berumur 40 HST.

Bila nilai wereng terkoreksi kurang dari lima ekor pada saat tanaman berumur di bawah 40 HST, atau kurang dari 20 ekor pada saat tanaman berumur di atas 40 HST, maka insektisida tidak perlu diaplikasikan, tetapi pengamatan tetap perlu dilanjutkan.

Insektisida yang manjur mengendalikan hama wereng coklat dan wereng punggung putih diantaranya adalah *fi pronil* dan *imidaklopid*. Insektisida *buprofezin* dapat digunakan untuk pengendalian wereng coklat populasi generasi 1 atau 2, sedangkan *fi pronil* dan *imidaklopid* untuk wereng coklat generasi 1,2,3 dan 4.
4. Monitoring terhadap penyakit tungro dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap hama wereng hijau di pesemaian dengan cara menjaring serangga sebanyak 10

ayunan untuk mengevaluasi populasi wereng hijau. Selain itu, juga diadakan uji yodium dari 20 daun padi yang diambil dari lahan yang sedang dievaluasi. Jika hasil perkalian antara jumlah wereng hijau dan persentase daun terinfeksi sama atau lebih dari 75, maka pertanaman dalam situasi terancam tungro. Langkah yang perlu diambil adalah aplikasi *antifidan* dengan bahan aktif *imidakloprid* dan atau *tiametoksan*. Di pesemaian atau saat tanaman berumur 1 MST gunakan *tiametoksan* dengan dosis 2,5 g b.a/ha atau 0,50 g *imidakloprid*/ha untuk menghambat penularan. Apabila tidak mampu mengamati populasi dan tanaman terinfeksi di pesemaian, amati gejala tungro saat tanaman berumur 3 MST. Aplikasi insektisida dilakukan apabila terdapat lima gejala dari 10.000 rumpun tanaman saat berumur 2 MST atau dua gejala dari 1.000 rumpun tanaman saat berumur 3 MST. Insektisida yang dapat digunakan antara lain *imidakloprid*, *tiametoksan*, *etofenproks* dan karbofuran.

Di Kabupaten Sidenreng Rappang, ada tiga jenis pestisida yang sering dipakai oleh para petani dalam hal pengendalian hama dan penyakit yakni insektisida, herbisida, dan rodent. Pestisida yang paling banyak digunakan pada tahun 2012 adalah insektisida sedangkan pada tahun 2013 adalah rodentisida. Tentunya upaya pemerintah dalam hal seperti ini yakni berperan dalam penyediaan

pestisida sebagai bentuk upaya yang dilakukan agar produksi padi terus meningkat tiap tahunnya. Adapun penggunaan pestisida pada tahun 2012 dan 2013 dapat diamati pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Realisasi Penggunaan Pestisida Tahun 2012

No	Bulan	Insektisida		Herbisida		Rodent (Kg)
		Cair (Ltr)	Padat (Kg)	Cair (Ltr)	Padat (Kg)	
1	Januari	25,45	-	-	-	10,82
2	Februari	15,00	-	-	-	21,64
3	Maret	21,00	-	-	-	-
4	April	8,00	-	5,00	-	21,64
5	Mei	10,00	-	3,00	-	21,64
6	Juni	14,00	-	-	-	21,64
7	Juli	12,00	-	5,00	-	43,28
8	Agustus	15,00	-	30,00	-	10,82
9	September	55,00	-	7,00	-	-
10	Oktober	42,00	-	-	-	32,46
11	November	19,00	-	-	-	-
12	Desember	44	-	-	-	-
	Jumlah	280,00	-	50	-	183,94

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Tabel 4.13 Realisasi Penggunaan Pestisida Tahun 2013

No	Bulan	Insektisida		Herbisida		Rodent (Kg)
		Cair (Ltr)	Padat (Kg)	Cair (Ltr)	Padat (Kg)	
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-
5	Mei	41.00	-	-	-	55.00
6	Juni	65.00	-	-	-	125.00
7	Juli	65.00	-	30.00	-	105.00
8	Agustus	72.00	-	69.00	-	35.00
9	September	-	-	67.00	-	-
10	Oktober	-	-	-	-	110.00
11	November	52.00	-	45.00	-	111.00
12	Desember	75	-	89	-	85
	Jumlah	370.00	-	300	-	626.00

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

4.2.6 Panen

Saat panen yang tepat adalah pada waktu biji telah masak fisiologis, atau apabila sekitar 90-95% malai telah menguning. Benih padi ketika baru dipanen masih tercampur dengan kotoran fisik dan benih jelek. Oleh karena itu, bila pertanaman benih telah lulus dari pemeriksaan lapangan, masalah mutu benih padi setelah panen biasanya berasosiasi dengan mutu fisiologis, mutu fisik dan kesehatan benih.

Lahan pertanaman untuk produksi benih dapat dipanen apabila sudah dinyatakan lulus sertifikasi lapangan oleh Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB). Sebelum panen dilakukan, semua mulai dari kegiatan *Roguing* harus dikeluarkan dari areal yang akan dipanen. Hal ini untuk menghindari tercampurnya calon benih dengan malai sisa roguing. Selain itu, perlu disiapkan peralatan yang akan digunakan panen (sabit, karung, terpal, alat perontok (*thresher*), karung dan tempat/alat pengering) serta alat-alat yang akan digunakan untuk panen dibersihkan.

Dua baris tanaman yang paling pinggir sebaiknya dipanen terpisah dan tidak digunakan sebagai calon benih. Panen dapat dilakukan dengan potong tengah jerami padi kemudian dirontok dengan *thresher* atau potong bawah lalu digebot. Ukur kadar air panen dengan menggunakan *moisture meter*. Calon benih

kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diberi label yang berisi : nama varietas, tanggal panen, asal pertanaman dan berat calon benih.; lalu diangkut ke ruang pengolahan benih. Buat laporan hasil panen secara rinci yang berisi tentang tanggal panen, nama varietas, kelas benih, bobot calon benih dan kadar air benih saat panen. Dua baris tanaman yang paling pinggir sebaiknya dipanen terpisah dan tidak digunakan sebagai calon benih. Panen dapat dilakukan dengan potong tengah jerami padi kemudian dirontok dengan thresher atau potong bawah lalu digebot. Ukur kadar air panen dengan menggunakan *moisture meter*. Calon benih kemudian dimasukkan ke dalam karung dan diberi label yang berisi : nama varietas, tanggal panen, asal pertanaman dan berat calon benih.; lalu diangkut ke ruang pengolahan benih. Buat laporan hasil panen secara rinci yang berisi tentang tanggal panen, nama varietas, kelas benih, bobot calon benih dan kadar air benih saat panen.

Adapun masa panen di Kabupaten Sidenreng Rappang juga di tentukan pada saat kegiatan tudang sipulung. Di Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri, masa panen biasanya dilakukan pada bulan Maret dan September. Namun, waktu masa panen ini juga bisa berubah tergantung cuaca itu sendiri.

4.3 Kondisi Produksi Pertanian Padi Kabupaten Sidenreng Rappang

Produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menjadi sektor andalan dalam menopang perekonomian daerah serta sangat mempengaruhi PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidenreng Rappang sekitar 48% dari sektor pertanian padi. Tidak hanya itu, target produksi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang cukup tinggi dan sampai saat ini selalu tercapai. Bahkan dapat dikatakan bahwa cering produksi Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap total produksi di Sulawesi Selatan kurang lebih 18,8% sehingga baik produksi dari segi tipe lahan, irigasi dan non irigasi selalu ada peningkatan. Hal ini diungkapkan oleh kepala dinas pertanian dan perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang bapak Ir. Amiruddin, MS bahwa :

“...di Sidrap ini ada yang dinamakan lahan irigasi dan non irigasi. Alhamdulillah target produksi yang diberikan oleh pusat cukup tinggi dan selalu tercapai. Bahkan boleh dikatakan bahwa cering produksi Sidrap terhadap total produksi di Sulawesi Selatan kurang lebih 18,8% sehingga baik produksi dari segi tipe lahan, irigasi dan non irigasi selalu ada peningkatan...”

(Wawancara, 11 Februari 2015)

4.3.1 Kondisi produksi pertanian padi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011

Realisasi produksi tanaman padi tahun 2011 Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 418,778.56 ton dengan luas panen 80,331.78 Ha.

Kecamatan dengan produksi tanaman Padi terbesar adalah Kecamatan Pitu Riawa yakni 63,874.07 ton pada luas tanam 12,829.00 ha, disusul Kecamatan Watang Sidenreng 63,523.14 ton dan produksi tanaman padi terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang dengan total produksi 19,711.92 ton. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Realisasi Produksi Padi Tahun 2011 Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Puso	Produksi (Ton)
1	Panca Lautang	7,107.00	24.00	35,068.79
2	Tellu LimpoE	4,774.00	-	23,747.07
3	Watang Pulu	6,507.00	950.00	27,710.24
4	Baranti	6,969.00	431.00	32,421.94
5	Panca Rijang	4,460.00	211.00	19,711.92
6	Kulo	5,492.00	451.00	23,092.71
7	MaritengngaE	10,779.00	-	54,180.43
8	Watang Sidenreng	12,637.00	179.00	63,523.14
9	Pitu Riawa	12,829.00	280.00	63,874.07
10	Dua PituE	11,096.00	-	55,674.18
11	Pitu Riase	4,375.00	10.00	19,774.08
	Jumlah	87,025.00	2,536.00	418,778.56

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

4.3.2 Kondisi produksi pertanian padi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2012

Realisasi produksi tanaman padi tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 457.986 ton dengan luas panen 80.880 Ha. Jumlah produksi padi pada tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15 Produksi Padi Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	URAIAN	2012
1	Luas Tanam (Ha)	
	- Musim Gadu	43.391,32
	- Musim Rendengan	43.400,16
	Jumlah	86.791,48
2	Luas Panen bersih (Ha)	
	- Musim Gadu	41.235,00
	- Musim Rendengan	39.645,00
	Jumlah	80.880,25
3	Produktivitas (Ku/Ha)	
	- Musim Gadu	59,04
	- Musim Rendengan	54,46
	Jumlah	56,63
4	Produksi (Ton GKG)	
	- Musim Gadu	243.431,99
	- Musim Rendengan	214.539,00
	Jumlah	457.986,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Kecamatan dengan produksi tanaman Padi terbesar adalah Kecamatan Watang Sidenreng yakni 71.838,62 ton pada luas lahan 13.179,16 ha, disusul Kecamatan MaritengngaE 61.519,77 ton dan

produksi tanaman padi terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang dengan total produksi 20.938,34 ton. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Realisasi Produksi Padi Tahun 2012 Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Puso	Produksi (Ton)
1	Panca Lautang	6.248,00	175,00	32.268,50
2	Tellu LimpoE	4.753,00	224,00	27.338,39
3	Watang Pulu	6.822,00	-	42.285,71
4	Baranti	6.987,00	94,00	41.920,15
5	Panca Rijang	4.425,00	-	20.938,34
6	Kulo	6.146,00	-	28.987,08
7	MaritengngaE	10.801,00	-	61.519,77
8	Watang	13.179,16	368,00	71.838,62
9	Sidenreng	12.920,32	57,00	54.064,35
10	Pitu Riawa	10.283,00	810,00	54.194,37
11	Dua PituE Pitu Riase	4.227,00	-	23.999,67
	Jumlah	86.791,48	1.728,00	457.986,00

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Penggunaan jenis varietas untuk pertanaman padi dalam tahun 2012 dari varietas yang sesuai anjuran dan yang tidak sesuai anjuran Tudang Sipulung. Penggunaan Varietas sesuai anjuran seluas 51.423,12 Ha atau 60,01% dari total tanam, sedangkan varietas yang tidak sesuai anjuran seluas 34.401,88 Ha atau 39,99%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketersediaan varietas pada saat petani membutuhkan sehingga petani menggunakan varietas yang tersedia walaupun tidak dianjurkan. Secara terinci digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.17 Realisasi Penggunaan Varietas Per Musim Tanam Tahun 2012

NO	Musim Tanam	Varietas Sesuai Anjuran		Varietas Tidak Sesuai Anjuran	
		Varietas	Luas (Ha)	Varietas	Luas (Ha)
1	MT. 2011/2012	Cigeulis	586,94	Cisanta	1.385,00
		Ciherang	4.792,28	Ciliwung	3.196,54
		Infari 7	6.571,21	Way Apaburu	7.560,39
		Mekongga	4.541,36	Inpari 9	4.958,35
		Infari 1	1.014,07	Cisantana	65,00
		Sembada 168	3.511	Cibogo	130,25
		SL 8 SHS	435	IR 64	219,15
				IR 66	228,70
				Kalimas	-
				Situ Bagendit	240,00
				Inpari 4	1.625,50
				Inpari 6	-
				Inpari 13	1,00
				Inpari 10	-
		Inpari 8	1.749,21		
		Pulut	18,40		
		Lain-Lain	435,65		
	Jumlah		21.452		21.813
	%		49,59		50,41
2	MT. 2012	Cisanta	467,00	Cigeulis	1.212,30
		Way Apoburu	1.628,00	Ciliwung	945,24
		Inpari 7	8.303,99	Ciherang	2.837,40
		Mekongga	10.914,12	Inpari 9	4.116,67
		IR 66	263,46	IR 64	745
		Inpari 4	1.058	Situ Bagendit	985,35
		Inpari 13	715,55	Inpari 6	1.147
		Inpari 8	637	Membram	23,50
		Sembada B9	2.534	Pulut	6,15
		Sembada B168	3.450	Inpari 1	570,27
	Jumlah		29.971,12		12.588,88
	%		70,43		29,57
	TOTAL		51.423,12		34.401,88
	%		60,01		39,99

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Tentunya dalam proses penanaman sampai kepada masa panen, petani di Kabupaten Sidenreng Rappang seringkali mengalami masalah-masalah seperti kerusakan pada tanaman padi

tersebut. Kerusakan tanaman padi ini diakibatkan serangan hama dan penyakit. Serangan hama/penyakit pada tanaman padi tahun 2012 diantaranya adalah tikus, penggerek batang, ulat grayak, kresek, walang sangit, keong mas, kepik hitam dan wereng coklat. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan kekeringan juga salah satu penyebab kerusakan pada tanaman padi. Seperti yang informan Anton yang berprofesi sebagai petani pemilik dan penggarap di Kecamatan MaritengngaE katakan bahwa:

“...terkadang dalam pengolahan sawah itu masalah yang sering di temui pada tahun 2012 kalau saya ndak salah ingat itu yaitu adanya serangan hama seperti penggerek batang dan tikus, selain itu ada juga penyakit seperti kresek dan blas, kadang-kadang juga mengalami kekurangan air, pada saat dibutuhkan kurang...”

(Wawancara, 29 Januari 2015)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan Sabil, petani penggarap di Kecamatan Panca Rijang bahwa :

“...masalah yang ditemui yakni hama, tikus, penggerek batang dan wereng coklat, serta mengalami kekurangan air karena saya sistemnya tadah hujan...”

(Wawancara, 05 Februari 2015)

Luas serangan hama/penyakit pada tanaman padi tahun 2012 menurut jenis hama/penyakit yang menyerang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.18 Luas Serangan Hama/Penyakit pada Tanaman Padi Musim Tanam 2011/2012 dan Tahun 2012

NO	JENIS HAMA/PENYAKIT	LUAS SERANGAN (Ha)		
		MT. 2011/2012	MT. 2012	TAHUN 2012
1	Tikus	48,25	61,00	109,25
2	Penggerek Batang	119,55	65,00	184,55
3	Ulat Grayak	8,50	12,00	20,50
4	Kresek	52,50	34,00	86,50
5	Walang Sangit	22,00	-	22,00
6	Keong Mas	7,50	1,00	8,50
7	Kepik Hitam	3,00	3,00	6,00
8	Wereng Coklat	0,25	4,30	4,55
	JUMLAH	261,55	180,00	441,85

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Adapun luas kerusakan (puso) pada tanaman padi tahun 2012 secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 4.19 Luas Kerusakan (puso) pada Tanaman Padi Tahun 2012

NO	FAKTOR PENYEBAB	LUAS KERUSAKAN / PUSO		
		MT. 2011/2012	MT. 2012	TAHUN 2012
1	Banjir	14	1.714	1.728
2	Kekeringan	-	-	-
	Jumlah	14	1.714	1.728

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa hama/penyakit yang paling banyak menyerang tanaman padi pada tahun 2012 adalah penggerek batang yakni sebanyak 184,55 Ha dan banjir merupakan faktor penyebab kerusakan pada tanaman padi pada tahun 2012 seperti yang tergambar pada tabel 4.19.

Alat dan mesin pertanian cukup memegang peranan penting dalam rangka peningkatan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Baik dalam kegiatan pengelolaan prapanen maupun pasca panen. Adapun jenis alat dan mesin pertanian tahun 2012 diantaranya traktor roda dua, traktor roda empat dan yang paling banyak adalah sabit bergerigi.

4.3.3 Kondisi produksi pertanian padi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2013

Realisasi produksi tanaman padi tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 461.617,45 ton dengan luas panen 83.686,00 Ha. Rata-rata hasil dan produksi per Musim Tanam terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.20 Produksi Padi Tahun 2013 dibanding Tahun 2012
Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	URAIAN	2012	2013	Kenaikan (+) Penurunan (-)
1	Luas Tanam (Ha)			
	- Musim Gadu	43.391,32	43.229,00	- 0,37
	- Musim Rendengan	43.400,16	47.003,00	+ 8,30
	Jumlah	86.791,48	90.232,00	+ 3,96
2	Luas Panen bersih (Ha)			
	- Musim Gadu	41.235,00	41.245,70	+ 0,03
	- Musim Rendengan	39.645,00	42.440,39	+7,05
	Jumlah	80.880,25	83.686,09	+ 3,47
3	Produktivitas (Ku/Ha)			
	- Musim Gadu	59,04	53,59	- 9,23
	- Musim Rendengan	54,46	52,74	- 3,16
	Jumlah	56,63	55,16	- 2,60
4	Produksi (Ton GKG)			
	- Musim Gadu	243.431,99	229.595,21	- 5,68
	- Musim Rendengan	214.539,00	232.002,24	+ 8,15
	Jumlah	457.986,00	461.617,45	+ 0,80

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Berdasarkan data pada tabel 4.20, menunjukkan angka produksi padi tahun 2013 meningkat sebesar 3.631,45 Ton atau 0,80% dibanding pada tahun 2012.

Peningkatan produksi padi ini tentunya sangat dirasakan oleh para petani di Kabupaten Sidenreng Rappang. Seperti yang dikatakan oleh informan Anton yang selama 7 tahun berprofesi sebagai petani. Anton mengungkapkan bahwa :

“...kalau berbicara soal perbandingan, selama ini produksi pertanian padi saya selalu meningkat. Hasil yang diperoleh beda-beda tipis dengan tahun-tahun sebelumnya dan produksi padi yang paling besar adalah musim tanam april-september 2013...”

(Wawancara, 29 Januari 2015)

Kecamatan dengan produksi padi terbesar pada tahun 2013 adalah kecamatan Pitu Riawa dengan total produksi 79,227.38 ton dengan luas tanam 14,632.00 ha sedangkan kecamatan dengan produksi padi terkecil adalah Kecamatan Panca Rijang dengan total produksi 23,343.15 ton untuk luas tanam sebanyak 4,491.00 ha. Untuk lebih jelasnya digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.21 Realisasi Produksi Padi Tahun 2013 Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Kecamatan	Luas Tanam (ha)	Rusak/Puso	Produksi (Ton)
1	Panca Lautang	7,193.00	949.00	33,130.56
2	Tellu LimpoE	4,684.00	1,232.00	18,114.77
3	Watang Pulu	6,759.00	-	34,627.53
4	Baranti	6,991.00	148.00	38,485.03
5	Panca Rijang	4,491.00	-	23,343.15
6	Kulo	4,955.00	-	25,491.00
7	MaritengngaE	9,676.00	50.00	52,535.81
8	Watang Sidenreng	13,362.00	1,693.00	64,332.78
9	Pitu Riawa	14,632.00	-	79,227.38
10	Dua PituE	11,843.00	-	64,349.42
11	Pitu Riase	5,646.00	-	27,980.02
	Jumlah	90,232.00	4,072.00	461,617.45

Adapun penggunaan jenis varietas untuk pertanaman padi dalam tahun 2013 dari varietas yang sesuai anjuran dan yang tidak sesuai anjuran Tudang Sipulung. Penggunaan Varietas sesuai anjuran seluas 59.146,22 Ha atau 65,55% dari total tanam,

sedangkan varietas yang tidak sesuai anjuran seluas 31.085,78 Ha atau 34,45%. Hal ini disebabkan oleh rendahnya ketersediaan varietas pada saat petani membutuhkan sehingga petani menggunakan varietas yang tersedia walaupun tidak dianjurkan. Secara terinci digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4.22 Realisasi Penggunaan Varietas Per Musim Tanam
Tahun 2013

NO	Musim Tanam	Varietas Sesuai Anjuran		Varietas Tidak Sesuai Anjuran			
		Varietas	Luas (Ha)	Varietas	Luas (Ha)		
1	MT. 2012/2013	Infari 6	283,00	Cisanta	234,05		
		Infari 9	2.284,04	Ciliwung	699,87		
		Ciherang	4.860,85	Way Apoburu	2.010,11		
		Infari 7	9.339,54	Cigeulis	374,61		
		Mekongga	9.000,87	Situ Bagendit	419,25		
		Kalimas	123,00	Infari 4	1.071,00		
		Infari 10	-	Infari 13	1.427,00		
		Infari 1	-	Infari 8	1.183,00		
		Infari 3	466,50	Inpago 3	466,50		
		Sembada 168	5.361,05	Pulut	0,26		
		SL 8 SHS	40,00				
		Sembada B9	5.361,05				
		Devgen I	2.050,00				
			Jumlah		35.343,35		7.885,65
	%		81,76		18,24		
2	MT. 2013	Cisanta	557,65	Cigeulis	130,00		
		Way Apoburu	1.189,97	Ciliwung	2.376,62		
		Inpari 4	6.538,43	Ciherang	3.296,30		
		Mekongga	10.175,56	Inpari 14	728,35		
		IR 66	58,00	IR 64	65,00		
		Kalimas	123,15	Inpari 8	1.588,60		
		Inpari 13	1.078,80	Inpari 7	11.577,63		
		Inpari 10	-	Impago 3	878,40		
		Inpari 9	3.500,69	Pulut	158,23		
		Situ Bagendit	580,62	Inpari 1	226,00		
				SL 8 SHS	250,00		
				Devgen I	1.925,00		
			Jumlah		23.802,87		23.200,13
			%		50,64		49,36
	TOTAL		59.146,22		31.085,78		
	%		65,55		34,45		

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Sama halnya pada tahun 2012, pada tahun 2013 pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami kerusakan.

Kerusakan tanaman padi diakibatkan serangan hama dan penyakit. Serangan hama/penyakit pada tanaman padi tahun 2013 diantaranya adalah tikus, penggerek batang, ulat grayak, kresek, walang sangit, keong mas, hama putih palsu, wereng coklat, blast dan lalat babi. Selain itu, bencana alam seperti banjir dan kekeringan juga salah satu penyebab kerusakan pada tanaman padi. Luas serangan hama/penyakit pada tanaman padi tahun 2013 menurut jenis hama/penyakit yang menyerang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.23 Luas Serangan Hama/Penyakit pada Tanaman Padi Musim Tanam 2012/2013 dan Tahun 2013

NO	JENIS HAMA/PENYAKIT	LUAS SERANGAN (Ha)		
		MT. 2012/2013	MT. 2013	TAHUN 2013
1	Tikus	275,55	118,00	393,55
2	Penggerek Batang	82,00	28,00	110,00
3	Ulat Grayak	13,00	19,00	32,00
4	Kresek	74,25	23,00	97,25
5	Walang Sangit	24,00	27,00	51,00
6	Keong Mas	20,00	15,00	35,00
7	Hama Putih Palsu	7,00	2,00	9,00
8	Wereng Coklat	2,00	-	2,00
9	Blast	6,50	28,00	34,50
10	Lalat Babi	-	11,75	11,75
	JUMLAH	504,30	271,75	776,05

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Adapun luas kerusakan (puso) pada tanaman padi tahun 2013 secara terperinci sebagai berikut :

Tabel 4.24 Luas Kerusakan (puso) pada Tanaman Padi Tahun 2013

NO	FAKTOR PENYEBAB	LUAS KERUSAKAN / PUSO		
		MT. 2012/2013	MT. 2013	TAHUN 2013
1	Banjir	-	3.543,36	3.543,36
2	Kekeringan	-	93,92	93,92
	Jumlah	-	3.637,28	3.637,28

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Pada tabel 4.23 menggambarkan bahwa hama/penyakit yang paling merusak tanaman padi pada tahun 2013 adalah tikus dengan kerusakan sebesar 393,55 Ha. Jika dibandingkan pada tahun 2012 dengan jumlah kerusakan 441,85 Ha, maka dapat tergambar jelas bahwa jumlah luas kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama/penyakit meningkat pada tahun 2013 yakni dengan jumlah kerusakan sebanyak 776,05 Ha. Seperti halnya dengan kerusakan yang disebabkan oleh banjir dan kekeringan juga mengalami peningkatan pada tahun 2013 dengan jumlah kerusakan sebanyak 3.637,28 Ha seperti yang tergambar pada tabel 4.24.

Tentunya kondisi seperti ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan produksi pertanian padi bisa menurun. Seperti yang di ungkapkan oleh informan bapak Sabil yang telah berprofesi sebagai petani selama puluhan tahun. Ia mengungkapkan bahwa:

“...yang paling mempengaruhi peningkatan produksi itu selama saya bertani tergantung cuacaji saja sama serangan hama dan penyakit. Kalo terjadi hal seperti

maka upaya yang dilakukan kalau misalnya serangan hama ya disemprot pestisida dan kalau misalnya kekeringan atau kekurangan air, biasanya di buat sumur bor...”

(Wawancara, 05 februari 2015)

4.3.4 Kondisi produksi pertanian padi Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2014

Realisasi produksi tanaman padi tahun 2014 Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 488.883 ton dengan luas panen 86.354,00 Ha. Rata-rata hasil dan produksi per Musim Tanam terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.25 Estimasi Luas Panen, Hasil/Hektar dan Produksi (Padi Sawah dan Padi Ladang)
Berdasarkan Hasil Perhitungan Angka Tetap Provinsi 2014
Provinsi: Sulawesi Selatan, Kabupaten: Sidenreng Rappang

Kabupaten/ Kota	Januari-April			Mei-Agustus			September-Desember			ASEM 20014		
	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (ha)	Hasil/Ha (ku/ha)	Produksi (ton)
Sidenreng Rappang	41.587	63,28	263.148	26.170	49,44	139,273	16.597	52,09	66.462	86.354	56.61	488.883

Sumber: Dinas Pertanian Ka. Sidrap

Sama halnya pada tahun sebelumnya, pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang juga mengalami kerusakan. Kerusakan tanaman padi diakibatkan serangan hama dan penyakit. Serangan hama/penyakit pada tanaman padi tahun 2014 diantaranya adalah tikus, penggerek batang, ulat grayak, kresek, walang sangit, keong mas, hama putih palsu, wereng coklat, blast dan lalat babi. Luas serangan hama/penyakit pada tanaman padi

tahun 2014 menurut jenis hama/penyakit yang menyerang tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 4.26 Luas Serangan Hama/Penyakit pada Tanaman Padi Musim Tanam 2013/2014 dan Tahun 2014

NO	JENIS HAMA/PENYAKIT	LUAS SERANGAN (Ha)		
		MT. 2013/2014	MT. 2014	TAHUN 2014
1	Tikus	299,55	99	398,55
2	Penggerek Batang	87,00	14	101,00
3	Ulat Grayak	13,00	-	13,00
4	Kresek	104,25	22,50	126,75
5	Walang Sangit	24,00	7	31,00
6	Keong Mas	20,00	3	23,00
7	Hama Putih Palsu	7,00	6	13,00
8	Wereng Coklat	2,00	3,55	5,55
9	Blast	5,50	-	5,50
	JUMLAH	519	161,05	716,35

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

Pada tabel 4.26 menggambarkan bahwa hama/penyakit yang paling merusak tanaman padi pada tahun 2014 adalah tikus dengan kerusakan sebesar 398,55 Ha. Jika dibandingkan pada tahun 2012 dengan jumlah kerusakan 441,85 Ha, maka dapat tergambar jelas bahwa jumlah luas kerusakan yang disebabkan oleh serangan hama/penyakit meningkat pada tahun 2013 yakni dengan jumlah kerusakan sebanyak 776,05 Ha dan terjadi penurunan pada tahun 2014 yakni 716,35 Ha.

Untuk melihat perbandingan hasil produksi dari tahun 2011 sampai dengan 2014, dapat diperhatikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.27 Perbandingan Produksi Padi Tahun 2011-2014
Kabupaten Sidrap

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Produksi (Ton GKG) - Musim Gadu - Musim Rendengan		243.431,99 214.539,00	229.595,21 232.002,24	
	Jumlah	418.778,56	457.986,00	461.617,45	488.883

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidrap

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Salah satu upaya pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan produksi pertanian padi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2011, 2012, 2013, dan 2014 adalah dengan mengadakan program Sekolah Lapang-Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) untuk padi hibrida dan non hibrida yang sekarang berganti nama menjadi Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) yang mana dalam programnya menggunakan teknologi (benih unggul, jarak tanam, dan penggunaan pupuk berimbang), dan Optimasi Lahan. Pola SRI yakni cara bertanam padi kembali ke alam, artinya petani tidak lagi menggunakan pupuk kimia, tapi menggunakan bahan-bahan alami/memanfaatkan jerami, limbah gergaji, sekam dan pupuk kandang dengan salah satu komponen teknologi adalah tanaman bibit muda, yakni 7 sampai dengan 12 hari. SLPTT merupakan bentuk sekolah yang seluruh proses belajar-mengajarnya dilakukan di lapangan, yang dilaksanakan di lahan petani peserta PTT dalam upaya peningkatang produksi padi nasional.

Selain itu adapula program pemerintah pada kegiatan APBD tahun 2012 dalam hal peningkatan produksi pertanian diantaranya

pembinaan dan peningkatan keterampilan/kemampuan petani, pembinaan kebutuhan sarana dan prasarana pertanian serta operasional pengendalian hama dan penyakit.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah dalam membantu para petani di Kabupaten Sidrap melakukan kegiatan pertanian khususnya dukungan pembangunan pertanian dalam rangka peningkatan produksi sektor pertanian di daerah serta mendorong sektor pertanian yang tengah dihadapkan pada permasalahan pokok berupa meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, keterbatasan di dalam infrastruktur, menurunnya ketersediaan air, dan daya dukung prasarana irigasi, adanya serangan hama dan penyakit, serta terjadinya bencana alam seperti banjir dan kekeringan.

Faktor utama yang mempengaruhi peningkatan produksi padi di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah kegiatan perluasan sawah yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun swadaya dimana luas tanam pada tahun 2013 meningkat dari 86.791,48 Ha menjadi 90.232,00 Ha. Karena jika dilihat dari luas kerusakan, total kerusakan pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 1.728 Ha menjadi 3.637,28 Ha. Begitu pula yang disebabkan oleh serangan hama/penyakit pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari 441,85 Ha menjadi 776,05 Ha.

5.2 Saran

Sagala bantuan dan upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tentunya sangat diharapkan oleh semua petani karena tentunya upaya pemerintah daerah itu berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian padi meraka. Saran penulis kepada pihak pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sendiri yakni memaksimalkan upaya dalam hal penyediaan benih dan pupuk yang terkadang terjadi keterlambatan dalam hal ketersediaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Ali, Farid dan Alam, Syamsu. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.

———. 2001. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Pers.

Dhakidae, Daniel. 2003. *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Jakarta: PT Kompas Media.

Faisal, Sanapiah. 2010. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hanafie, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Ishaq, Iskandar. 2009. *Petunjuk Teknis Penangkaran Benih Padi*. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat.

Istianto, Bambang. 2009. *Manajemen Pemerintahan Dalam Perpektif Pelayanan Publik*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Kaho, Josef Riwu Kaho. 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta. PolGov Fisipol UGM

Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*.

Mubyarto. 1989. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: LP3ES

Muhadjir, Noeng. 2004. *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluation Research*. Yogyakarta: Rake Sarasin

Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media

Prayitno, Hadi. 1985. *Pembangunan Ekonomi Pedesaan*. Yogyakarta: Liberty.

SANKRI. 2003. *Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT Rafika Aditama.

Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal:

Jurnal Kajian Lemhannas RI. Mei 2013. Meningkatkan Produktivitas Pertanian guna Mewujudkan Ketahanan Pangan dalam Rangka Ketahanan Nasional

Website:

<http://www.Komponen-dasar-analisis-sistem.comcitradestianty.htm>.

diakses Oktober 2014.

<https://arioneuodia.wordpress.com/2012/10/27/meningkatkan-produksi-pertanian/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2014

Perundang-undangan:

Undang- undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

LAMPIRAN

Pedoman Wawancara

1. Berapa lama anda berprofesi sebagai petani?
2. Bagaimana metode yang anda gunakan dalam bertani?
3. Selain bertani, apakah ada pekerjaan lain yang anda kerjakan?
4. Mengapa anda lebih memilih bertani sebagai pekerjaan utama anda?
5. Berapa luas lahan sawah yang anda miliki beserta garap selama dua tahun ini (2012 dan 2013)
6. Sudah berapa kali anda panen dalam kurun waktu dua tahun ini (2012 dan 2013)?
7. Apakah anda pernah mengalami gagal panen pada 4 musim tanam tersebut?
8. Masalah atau kendala seperti apa yang anda temui pada saat penggarapan sampai masa panen pada tahun 2012 dan 2013?
9. Apa upaya yang anda lakukan dalam menghadapi masalah-masalah tersebut?
10. Bagaimana perbandingan produksi hasil pertanian padi anda pada tahun 2012 dan 2013 (4 musim tanam)? apakah mengalami peningkatan atau sebaliknya?
11. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi pertanian padi anda pada tahun 2012 dan 2013?

12. Apakah anda mendapat bantuan dari pemerintah dalam bertani pada tahun 2012 dan 2013? Jika ada, bantuan seperti apa yang anda dapatkan?
13. Apakah upaya pemerintah sangat berpengaruh terhadap peningkatan produksi pertanian padi anda pada tahun 2012 dan 2013?
14. Bagaimana tanggapan anda terhadap upaya yang diberikan pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian padi pada tahun 2012 dan 2013?

Dokumentasi



Wawancara dengan petani dan ketua PPK Kecamatan MaritengngaE



Wawancara dengan petani di Kecamatan Panca Rijang



Petani penerima bantuan traktor



Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sidrap

Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Harapan Baru Blok A No. 6 Kompleks SKP Kabupaten Sidenreng Rappang

IZIN PENELITIAN

Nomor : 14/IP/KPTSP/1/2015

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 24 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kantor PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **HARDIYANTI KADIR** Tanggal **12-01-2015**
 3. Rekomendasi dari **UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR**
Nomor **16219/P2T-BKPM/19.36P/12/II/20** Tanggal **29-12-2014**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **HARDIYANTI KADIR**

ALAMAT : **JL. A. TAKKO KEL. RAPPANG KEC. PANCA RIJANG**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : " **ANALISIS KEBIJAKAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG** "

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **29 Desember 2014 s.d 29 Maret 2015**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Ditetapkan di : Batu Lappa
Pada Tanggal : 12-01-2015

Biaya : Rp. 0,00



Tembusan :

- DEKAN FISIP UNHAS MAKASSAR DI MAKASSAR
- KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SIDRAP
- PERTINGGAL



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu

Jln. Bougenville No. 5 Telp (0411) 441077 Fax. (0411) 448936

MAKASSAR 90222

Makassar, 29 Desember 2014

Nomor : 16219/PZT-BKPM/19.36P/12/VII/2014
 Lampiran : -
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada

Yth. Bupati Sidrap

di-

Sidrap

Berdasarkan surat Dekan FISIP UNHAS Makassar Nomor : 9543/UN4.9.1/PL.02/2013 tanggal 24 Desember 2014 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini :

Nama : **Hardiyanti Kadir**
 Nomor Pokok : **E 12111261**
 Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**
 Alamat : **Kampus UNHAS Tamalanrea, Makassar**

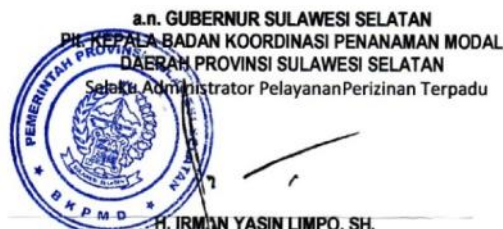
Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

"ANALISIS KEBIJAKAN PERTANIAN DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG"

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 29 Desember 2014 s/d 29 Maret 2015

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



H. IRMAN YASIN LIMPO, SH.

Pangkat : **Pembina Utama Madya, IV/d**
 NIP : **19670824 199403 1 008**

TEMBUSAN : Kepada Yth :

1. Dekan FISIP UNHAS Makassar di Makassar;
2. Peringatan!



website : <http://p2tbkpm.sulselprov.go.id> , email : p2t_provsulsel@yahoo.com



Surat Keterangan

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

SULAWESI SELATAN

Jl. Harapan Baru Blok B No. 17 Kompleks SKPD Kel. Batu Lappa Kab. Sidenreng Rappang
SULAWESI SELATAN

SURAT KETERANGAN

Nomor : 520/66 /Distanbun

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama | : Ir. HJ. NURAINI HAMID, M.Si |
| 2. NIP | : 19590703 199203 2 002 |
| 3. Pangkat/ Gol Ruang | : Pembina Tk. I, IV/b |
| 4. Jabatan | : Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan
Kabupaten Sidenreng Rappang |

Menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Nama | : Hardiyanti Kadir |
| 2. NIM | : E 121 11 261 |
| 3. Program Studi | : Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar |
| 4. Alamat | : Jl. A. Takko No. 9 Rappang |
| 5. No. Hp | : 085 244 994 430 |

Telah melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pangkajene, 11 Februari 2015

An. KEPALA DINAS

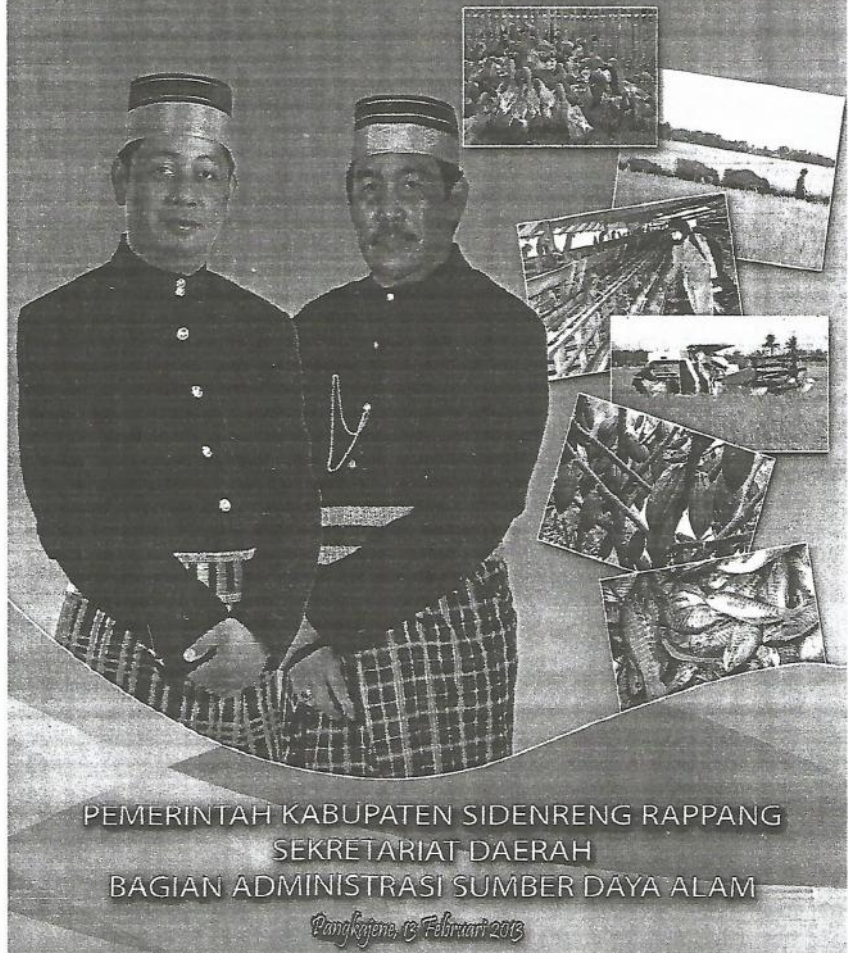


Ir. Hj. NURAINI HAMID, M.Si

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19590703 199203 2 002

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 82 TAHUN 2013
TENTANG
HASIL RUMUSAN MUSYAWARAH TUDANG SIPULUNG TERPADU
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013





BUPATI SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 82 TAHUN 2013

TENTANG

HASIL RUMUSAN MUSYAWARAH TUDANG SIPULUNG TERPADU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa pada pelaksanaan Musyawarah Tudang Sipulung terpadu tanggal 13 Februari 2013, disepakati Hasil Rumusan Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu dalam mencapai peningkatan produksi pada Sub Sektor Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Rumusan Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2013(Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 34);
9. Keputusan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32.a Tahun 2013 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013;

Memperhatikan : Hasil Rumusan Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Tingkat Kecamatan Tahun 2013, saran pendapat Tim Perumus/Tekhnis Kabupaten dan Provinsi serta Pandangan dari Kalangan Pallontara, Akademisi dan Praktisi ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Hasil Rumusan Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 13 Februari 2013

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Prop. Sulsel di Makassar
3. Kepala Dinas Pertanian TPH Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Kepala Dinas Peternakan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar
6. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
7. Ketua Pengadilan Negeri Sidrap di Pangkajene
8. Para Muspida Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
9. Inspektur Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene
10. Kepala Badan, Kantor, Dinas dan Instansi Terkait Setda Kab. Sidrap di Pangkajene
11. Para Camat bersama Jajaran Tekhnis Tingkat Kecamatan di Tempat
12. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sidrap di Pangkajene
13. Pertinggal-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 82 TAHUN 2013
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2013

HASIL RUMUSAN MUSYAWARAH TUDANG SIPULUNG TERPADU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2013

Memperhatikan Hasil Rumusan Musyawarah Tudang Sipulung masing-masing Kecamatan yang berlangsung pada tanggal 4 Februari s/d 6 Februari 2013, Usulan Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencana Alam dari Instalasi Pengamatan peramalan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Tiroang Pinrang, serta Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2013 pada tanggal 13 Februari 2013 serta beberapa pertimbangan teknis menyangkut kondisi curah hujan, ramalan Pallontara dan Nara sumber maka disepakati Hasil Rumusan sebagai berikut :

I. HASIL RUMUSAN POKJA A POLA TANAM, JADWAL TANAM PADI DAN SANKSI

A. POLA TANAM

1. Lahan Irigasi Tekhnis : Padi / Mina - Padi - Padi
2. Lahan Irigasi Setengah Tekhnis : Padi - Padi - Palawija
3. Lahan Irigasi Desa : Padi - Palawija - Palawija
4. Tadah Hujan : Kegiatan Pertanian disesuaikan dengan kondisi iklim
5. Diharapkan penanaman IP padi 300 pada Lahan Irigasi Tehnis dengan memperhatikan faktor teknis seperti pelaksanaannya tidak dianjurkan tiap tahun.

B. JADWAL TANAM TANAMAN PADI:

1. MUSIM TANAM 2013 (PERIODE APRIL - SEPTEMBER 2013)

- a. Secara umum, luas areal rencana tanam sawah irigasi tekhnis, setengah tekhnis, Desa dan tadah hujan seluas 43.915 Ha. Yang sebarannya sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)			
		APRIL	MEI	JUNI	JUMLAH
1.	PANCA LAUTANG	-	1.645	1.575	3.220
2.	TELLU LIMPOE	150	1.659	667	2.476
3.	WATANG PULU	-	1.851	1.640	3.491
4.	BARANTI	-	2.648	860	3.508
5.	KULO	-	2.057	1.043	3.100
6.	PANCA RIJANG	-	1.661	560	2.221
7.	WATANG SIDENRENG	1.140	5.363	-	6.503
8.	MARITENGGAE	500	4.943	-	5.443
9.	PITU RIAWA	-	5.148	1.277	6.425
10.	DUA PITUE	-	5.287	86	5.373
11.	PITU RIASE	500	1.413	242	2.155
JUMLAH		2.290	33.675	7.950	43.915

b. Sebaran rencana tanam tersebut di atas, diperkirakan panen pada bulan AGUSTUS dan SEPTEMBER 2013.

c. Sebelum kegiatan Musim Tanam 2013/2014 disepakati kegiatan, pembersihan saluran sekunder dan tersier oleh kelompok tani / P3A

2. MUSIM TANAM PADI MT. 2013/2014 (Periode Oktober 2013 - Maret 2014)

a. Rencana luas tanam dan rencana tanam padi pada Musim Tanam 2013/2014 yaitu 44.570 Ha berdasarkan sebaran Kecamatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)				
		OKT	NOPEMBER	DESEMBER	JANUARI	JUMLAH
1	PANCA LAUTANG	-	1.800	1.720	-	3.520
2	TELLU LIMPOE	-	1.687	740	-	2.427
3	WATANG PULU	-	949	1.638	1.091	3.678
4	BARANTI	-	1.858	1.652	-	3.510
5	KULO	-	90	2.031	995	3.116
6	PANCA RIJANG	-	1.411	819	-	2.230
7	WT. SIDENRENG	627	5.877	-	-	6.504
8	MARITENGGAE	706	4.737	-	-	5.443
9	PITU RIAWA	-	5.801	638	-	6.439
10	DUA PITUE	-	5.462	86	-	5.548
11	PITU RIASE	250	1.531	374	-	2.155
JUMLAH		1.583	31.203	9.698	2.086	44.570

b. Sebaran Rencana Tanam tersebut di atas, diperkirakan panen pada bulan Februari dan Maret 2014. Berdasarkan Rencana Luas Tanam komoditi padi pada 2 (dua) Musim Tanam, maka diharapkan dapat mencapai rata - rata produktivitas 6,7 Ton/ Ha/GKG.

C. RENCANA LUAS TANAM KOMODITI PALAWIJA TAHUN 2013.

NO	KECAMATAN	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	JUM
1	P. Lautang	-	-	100	200	-	-	100	200	400	-	-	0	1.000
2	Telhu Limpoe	450	1.550	-	-	-	-	-	500	1500	-	-	-	4000
3	Wt. Pulu	25	525	425	25	-	25	450	925	-	-	-	-	2.400
4	Sarami	-	-	-	150	-	-	-	50	-	-	-	-	200
5	Kulo	-	266	-	-	-	-	266	-	-	-	266	-	798
6	P.Riang	515	-	-	565	-	-	-	515	-	-	565	-	2.160
7	Wt. Sidenreng	452,79	200	-	-	-	-	180	443,79	397	-	-	370	2.045
8	Maritenggae	-	-	-	225	460	200	-	-	-	-	-	-	885
9	Pitu riawa	6.930	-	-	-	6.930	-	-	-	-	-	-	6.930	20.790
10	Dua Pitu	-	-	20,00	-	-	480,60	-	185,40	-	-	-	-	686
11	Pitu Riase	-	-	200	400	175	-	-	-	575	200	50	-	1.600
	JUMLAH	8.973	1.978	748	1.565	641	705	996	2.821	2.872	200	881	376	12.925

D. REKOMENDASI PENGGUNAAN PAKET TEKNOLOGI SARANA PRODUKSI PER Ha.

1. Komoditi Padi

a. Paket teknologi pertama (menggunakan Pupuk Tunggal)

- 1) Benih = 25 - 30 Kg/Ha
- 2) Urea = 250-300 Kg/Ha
- 3) Sp-36 = 50 - 100 Kg/Ha
- 4) ZA = 50 Kg/Ha
- 5) Organik = 500 -1000 Kg/Ha

b. Paket teknologi Kedua (menggunakan Pupuk Majemuk)

- 1) Benih = 25 - 30 Kg/Ha
- 2) Urea = 50 - 100 Kg/Ha
- 3) NPK = 300 Kg/Ha
- 4) ZA = 50 Kg/Ha
- 5) Organik = 500 -1000 Kg/Ha

2. Komoditi Palawija (Jagung)

a. Paket Teknologi Pertama

- 1) Benih = 15 Kg/Ha
- 2) Pupuk Organik = 1000 Kg/Ha
- 3) Urea = 350 Kg/Ha
- 4) NPK = 200 Kg/Ha

b. Paket Teknologi Kedua

- 1) Benih = 15 Kg/Ha
- 2) Urea = 300 Kg/Ha
- 3) Sp - 36 = 100 Kg/Ha
- 4) Pupuk organik = 2000 Kg/Ha

Paket Teknologi dimaksud, diharapkan petani dapat melakukan efisiensi penggunaan pupuk, dengan memperhatikan kondisi pertanaman di lapangan seperti metode Bagang warna Daun (BWG), mempertimbangkan tingkat ketersediaan hara dalam tanah dan tingkat kemasaman tanah, dll. Sehingga dengan demikian Rekomendasi Paket dimaksud dapat disesuaikan dengan kondisi lokal lahan, dan dimasa yang akan datang terwujud pengaplikasian pupuk berimbang oleh masyarakat petani.

E. VARIETAS YANG DIANJURKAN

NO	Musim Tanam 2013	No	Musim Tanam 2013/2014
I.	UMUR SEDANG	I.	UMUR SEDANG
1.	Cisantana	1.	Inpari 6
2.	Inpari 4	2.	Inpari 8
3.	Inpari 9	3.	Inpari 10
4.	Way Apoburu	4.	Kalimas
5.	Kalimas	5	Ciherang
6.	Mekongga	6.	Mekongga
II.	UMUR GENJAH	7.	Varietas Hibrida
1.	Inpari 13	II.	UMUR GENJAH
2.	Inpari 10	1.	Inpari 7 (Ruts)
3.	IR 66	2.	Inpari 1
4.	Situ Bagendit	3.	Inpari 3
		4.	Inpari 13
		5.	Varietas Umur Genjah lainnya

Catatan : Daerah rawan Wereng Coklat, Lakukan pergiliran varietas dan apabila menanam jenis varietas Hibrida, Ciliwung, Ciherang dan Inpari 7 perlu pengawalan ketat di lapangan dan hindari melakukan aplikasi pestisida di luar anjuran dan sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan musuh alami dan lingkungan agroekosistem. Dan daerah kronis OPT Tikus sebaiknya menanam padi sesuai jadwal dan tanam serampak bersamaan pase bunting dalam satu hamparan.

F. HAMA PENYAKIT YANG PERLU DIWASPADAI**Komoditi Padi :**

NO	MT. 2013	Keterangan
1.	OPT. Tikus	Terutama pada daerah serangan MT. 2013/2014 yang berlanjut dan berkembang populasinya pada MT. 2014 daerah rawan yaitu, sekitar lokasi banjir, sekitar kebun, kandang unggas, dan saluran pembuangan. Serangan terjadi pada saat pertanaman masa premordia (akhir bulan Juni sampai awal Juli). Sehingga perlu penanganan sebelum terserang.
2.	OPT. Penggerek Batang	Serangan akan muncul dari akibat penerbangan bulan April dan secara umum bertelur dipersemaian dan kelihatan serangan pada pertanaman muda (gejala sundep) sekitar bulan Mei sampai awal Juni 2013, terutama pada sentra pertanaman padi, penanganan Penggerek Batang MT. 2013 sebaiknya dan lebih efektif dilakukan pada persemaian.
3.	OPT. Wereng Coklat / Wereng Punggung Putih	Sekitar daerah yang ditemukan populasi Wereng Coklat (Musim Sebelumnya) dianggap berlokasi rawan, perlu pengawalan ketat di lapangan dan hindari melakukan aplikasi pestisida di luar anjuran dan sebaiknya dipertimbangkan keseimbangan musuh alami, dan lingkungan agroekosistem. Meledaknya populasi Wereng Coklat akibat rusaknya keseimbangan agroekosistem dari perlakuan pestisida yang tidak dianjurkan pada tanaman padi dengan tidak didasari hasil pengamatan lapang.
4.	OPT. Ulat Grayak	Populasi akan muncul apabila keadaan iklim cerah pada bulan Juli setelah tanaman berbuah yang bersamaan terjadinya pengeringan petakan sawah. Penanganan Ulat Grayak sebaiknya dilakukan pada tanaman fase mulai keluar buah dengan perlakuan petani pengeringan 7 - 10 hari lalu memasukkan air ke dalam petakan sawah (membenamkan) telur yang ada dipangkal batang tanaman padi, selama 1 - 2 hari selanjutnya dikeringkan lagi.
5.	Bencana Alam	Prediksi akan terjadi bencana banjir akhir Bulan Juni dan bencana kekeringan akan terjadi mulai Agustus sampai September pada MT 2013 prediksi terkena bencana alam.

NO	MT. 2013/2014	Keterangan
1.	Tikus	Terutama pada daerah yang rawan yaitu, sekitar lokasi banjir, dekat peternakan unggas, sekitar kebun dan saluran pembuangan.
2.	OPT. Penggerek Batang	Serangan akan muncul secara umum terjadi fase generatif akan lebih luas dan dalam kategori serangan ringan sampai sedang pada Bulan Februari 2014 (gejala Bluk) dan serangan pada fase vegetatif (sundep) apabila terjadi cerah pada Bulan Januari 2014.
3.	OPT. Ulat Grayak	Setelah tanaman berbuah yang bersamaan terjadinya pengeringan petakan sawah dengan cuaca cerah pada Bulan Februari - Maret, umumnya pada tanaman yang mengikuti jadwal tanam.
4.	OPT. Wereng Coklat, Walang Sangit, Wereng Punggung Putih, Kresak	Sering muncul di Bulan Februari apabila cuaca terus lembab terutama petakan sawah yang selalu tergenang dan jarang diganti airnya.
5.	Kepik Hitam	Muncul pada saat curah hujan tinggi/kelembaban tinggi, terutama pada varietas ciliwung.

G. TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT. YANG DIWASPADAI

1. OPT. Penggerek Batang

Fase Pertumbuhan	MT. 2013	MT. 2013/2014
1. Pesemaian	- Pengamatan intensif dipesemaian & perompesan kelompok telur. - Seed treatment - Aplikasi pestisida granular atau cair	- Relatif Aman, Kecuali Cuaca Cerah Pada Bulan Januari

2. Tanaman Muda	- Bila ada serangan 10% aplikasi pestisida Granular atau cair.	- Pengamatan lapangan utamanya varietas ciherang dan inpari 7. - Pengamatan imago pada lampu perangkap.
3. Premordia	- Relatif aman	- Pengamatan dengan pembedahan batang padi Stadia anakan maksimum - Aplikasi pestisida bila ditemukan 10 ulat per 10 rumpun tanaman padi - Aplikasi pestisida bila terjadi serangan >10%

Kunci sukses : Pengamatan dan aplikasi bila ditemukan 2 kelompok telur Pengerek batang atau insentitas serangan >10% mulai dari pesemaian sampai fase premordia.

2. OPT. Tikus

Fase Pertumbuhan Tanaman Padi	Teknik Pengendalian
Pratanam dan pengolahan tanah	- Gropyokan - Sanitasi lingkungan - Pembantaian tikus di pematang (Pendarahan) - Pemagaran pesemaian dengan plastik dikombinasi dengan perangkap/bubuk tikus
Pesemaian	- Gropyokan - Pengumpanan beracun - Pengemposan dikombinasi dengan jala kremat - Pengumpanan bila ada serangan atau jejak tikus utamanya pematang, saluran irigasi ,dll.

Tanaman Muda	<ul style="list-style-type: none"> - Sanitasi lingkungan terutama pematang /tanggul - Sanitasi lingkungan dan sarang tikus - Pengemposan lubang aktif dengan asap belerang
Premordia dan Berbunga	<ul style="list-style-type: none"> - Pegisian air pada lubang aktif dan ditutup rapat - Pengemposan lubang aktif dengan asap belerang
Pengisian dan Pematangan Bulir	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan keramat di padukan dengan pengisian air atau suntik lubang – lubang aktif - Pelestarian musuh alami dan pegamatan intensif pada lokasi rawan dan varietas aromatik.

Kunci sukses : Kegiatan pengendalian massal semai/tanam serempak. Pengendalian dilakukan secara massal, serentak dan berulang.

3. OPT.Wereng Batang (Wereng Coklat dan Punggung Putih)

Fase Pertumbuhan Tanaman Padi	Teknik Pengendalian
1. Pratanam / Pengolahan Tanah	<ul style="list-style-type: none"> - Pegolahan tanah percepat bila daerah tersebut daerah serangan. - Sebelum semai, pegolahan tanam harus dilakukan pada areal sekitar pesamai (radius 200 meter).
2. Tanam Muda/Berubah	<ul style="list-style-type: none"> - Bila menanam varietas Hybrid dan padi ulat/local harus dilakukan pegawasan lapangan lapangan yang ketat. - Pengawasan intensif dilakukan pada lokasi dan varietas rawan yakni pada umur 4 minggu dan 8 minggu setelah tanam, bila di temukan populasi yang seimbang dengan serangga yang lain jangan diganggu keberadaannya (Biarkan)

	- Aplikasi pestisida dilakukan dengan populasi Wereng Coklat lebih menonjol dari serangga lain (musuh alami) atau populasi 1-2 ekor/tunas dan ditemukan Wereng Coklat bunting.
--	--

Kunci sukses : Tanam varietas Tahan Inpari 3,4,6,8,9,13, Cisantana, Bundoyudo dan tanaman serempak serta Pemupukan berimbang .

4. OPT. Ulat Grayak

Fase Pertumbuhan Tanaman Padi	Teknik Pengendalian
1. Singgang/pesemaian	-Pengamatan kelompok telur dan larva sebaiknya dilakukan di selah batang atau rumput yang subur di sekitar pematang. Apabila tanggul/pematang sekitarnya bersih imago grayak tidak menempatkan telurnya. -Aplikasi insektisida bila ditemukan 1 (satu) kelompok telur atau 2-3 larva/meter.
2. Tanaman Muda	-Lakukan pengamatan kelompok telur dan larva pada pangkal batang terutama sawah yang tidak berair. Dan lakukan sanitasi terhadap rumput pematang.
3. Premordia	- Masukkan air dalam petakan sawah setinggi 15-20 cm selama 1-2hari untuk menenggelamkan kelompok yang ada pada pangkal batang padi agar tidak menetas. - Lakukan pengamatan larva utamakan pada pangkal/selah batang atau padi sawah yang tidak berair. Aplikasi insektisida atau SL-NPV bila ditemukan populasi 2 atau lebih larva setiap rumpun.

Kunci sukses : Pengendalian efektif adalah mengendalikan kelompok telur karena didalam 1 kelompok telur terdapat lebih kurang 1000 ekor yang akan menetas jadi ulat.

I. HAMA / PENYAKIT PALAWIJA DAN PERKEBUNAN

1. Penyakit Bulai
2. Lalat Biji
3. Hama Penggerak Tongkol
4. Penggerek Buah Kakao (PBK)
5. Vascular Streak Dieback/VSD

J. PRAKIRAAN KEBUTUHAN PUPUK PADA MUSIM TANAM 2013 dan MT. 2013/2014

1. KOMODITI PADI.

NO	BULAN	UREA (Ton)	SP 36 (Ton)	ZA (Ton)	NPK (Ton)	Organik (ton)
A. MT. 2013						
1.	Maret	-	-	-	-	-
2.	April	593,10	197,70	98,85	593,10	1977,00
3.	Mei	10071,34	3357,11	1678,56	10071,34	33571,12
4.	Juni	1912,38	637,46	318,73	1912,38	6374,59
TOTAL / musim tanam		12576,81	4192,27	2096,14	12576,81	41922,71
B. MT.2013/2014						
1.	Oktober	474,90	158,30	79,15	474,90	1583,00
2.	Nopember	8880,30	2960,10	1480,05	8880,30	29600,99
3.	Desember	3161,72	1053,91	526,95	3161,72	10539,08
4.	Januari	625,80	208,60	104,30	625,80	2086,00
TOTAL / musim tanam		13142,72	4380,91	2190,45	13142,72	43809,07
JUMLAH TOTAL / tahun		25719,53	8573,18	4286,59	25719,53	85731,78

2. KOMODITI PALAWIJA (JAGUNG)

NO	BULAN	UREA	SP 36	NPK	ORGANIK
1	APRIL	2877,98	822,28	1644,56	8222,79
2	MEI	691,25	197,50	395,00	2005,00
3	JUNI	260,75	74,50	149,00	500,00
4	JULI	600,25	171,50	343,00	2345,00
5	AGUSTUS	2700,25	771,50	1543,00	7715,00
6	SEPTEMBER	246,96	70,56	141,12	550,00
7	OKTOBER	255,50	73,00	146,00	300,00
8	NOPEMBER	1144,92	327,12	654,24	2736,00
9	DESEMBER	725,20	207,20	414,40	2640,00
10	JANUARI	70,00	20,00	40,00	680,00
11	PEBRUARI	215,25	61,50	123,00	815,00
12	MARET	2555,00	730,00	1460,00	7261,00
JUMLAH		12343,30	3526,66	7053,32	35769,79

3. TOTAL KEBUTUHAN PUPUK TAHUN 2013 (MT.2013 & MT. 2013/2014)

a. UREA	38.062,84 Ton
b. SP 36	12.099,84 Ton
c. ZA	4.286,59 Ton
d. NPK	32.772,85 Ton
e. ORGANIK	121.501,57 Ton

K. LAIN - LAIN

1. Pemberantasan tikus secara massal dilakukan setelah panen raya.
2. Terhadap pelanggaran yang diatur melalui PERDA dan UNDANG - UNDANG, seperti masalah yang berkaitan dengan irigasi, akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Pengaturan Pintu Air di Jaringan Utama dipercayakan sepenuhnya kepada aparat Pengelolaan Sumber Daya Air yang dibantu oleh GP3A.
4. Pengatur Air ditingkat Jaringan Tersier sepenuhnya dilakukan oleh Kelompok P3A.
5. Jadwal penutupan secara tentatip untuk Daerah Irigasi (DI) Saddang akan dilaksanakan penutupan mulai tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2013.
6. Untuk Daerah Irigasi Bulucenrana, Daerah Irigasi Bila dan Daerah Irigasi Bulu Timoreng dilakukan penutupan terhitung tanggal 1 s/d 30 September 2013.
7. Untuk Mengawali tanam April - September dan Oktober - Maret untuk Saluran Tersier dilakukan pembersihan oleh masing - masing kelompok P3A.
8. Dilarang membuang sampah, sisa tanaman dan bangkai-bangkai di saluran irigasi.
9. Pembuatan Balombong, selang Liar dan Pompa Liar yang mengambil air dari saluran induk merupakan pelanggaran berat dan sangat dilarang karena mengganggu suplay air ke daerah hilir.
10. Untuk mencapai hasil peran penyuluh dalam pembinaan terhadap kelompok tani sangat diharapkan.
11. Para Kelompok Tani mengakses kredit Bank BRI dan Bank Sulsel untuk membiayai semua sektor pertanian termasuk pengusaha kecil melalui Kredit Katahanan Pangan (KKP) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

12. Dihimbau kepada Kelompok Tani agar dalam penyusunan RDKK dilakukan 2 (dua) bulan sebelum memasuki musim tanam.
13. Bagi Petani yang melanggar ketentuan dalam hasil Rumusan Musyawarah Tudang Sipulung (melanggar varietas dan jadwal tanam dikenakan sanksi yang sifatnya mendidik yaitu pembersihan saluran irigasi sepanjang 100 meter atau sanksi lain yang ditentukan berdasarkan aturan Desa/Kelurahan yang disepakati.

II. HASIL RUMUSAN POKJA B (PENINGKATAN PRODUKSI PETERNAKAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN)

A. Sub Sektor Peternakan.

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap mewabahnya Penyakit Flu Burung melalui kegiatan pembersihan kandang (cleaning), penyemprotan Disinfektan (disinfection), pemberian vaksinasi lengkap (vaccination) sesuai anjuran / rekomendasi dengan memperkuat Bio Security.
2. Meningkatkan koordinasi antar daerah dalam pengawasan lalu lintas unggas, sapi dan limbah / kotoran ternak.
3. Meningkatkan frekuensi kunjungan Petugas Penyuluh Peternakan dan pimpinan peternakan kecamatan melalui kegiatan monitoring, investigasi dan pembinaan kepada peternak.
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit anjing gila (Rabies), Antraks Septicaemia Epizootica (SE) dan Brucellosis melalui kegiatan Vaksinasi dan Investigasi serta Eliminasi terhadap anjing tak bertuan. Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan vaksinasi dan investigasi hendaknya masyarakat pemilik ternak anjing ikut membantu petugas dalam handling (memegang/mengikat dan mengurung / tidak melepaskan anjing peliharaannya pada tahap eliminasi.
5. Meningkatkan kegiatan Pembinaan untuk peningkatan produksi ternak, antara lain Pembinaan pembuatan Pakan Ternak Ruminansia, manajemen beternak sapi dan Kambing metode intensifikasi (dikandangkan), formulasi pakan unggas (ras petelur, ras pedaging dan buras) dan lain - lain.
6. Meningkatkan kesadaran masyarakat Peternak dalam pelaksanaan sanitasi lingkungan, membakar/menguburkan unggas yang mati, tidak membiarkan bangkai unggas tersebut terlantar atau bahkan membuangnya kesungai/selokan atau saluran yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

7. Untuk mempertahankan populasi ternak yang ada, terutama ternak Sapi diharapkan masyarakat petani ternak tidak memotong Sapi Betina produktif atau mengeluarkan ternak sapi ke daerah lain tanpa surat izin pengeluaran ternak dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidrap.
8. Gerakan pencapaian populasi ternak Sapi potong melalui program peningkatan kelahiran dengan inseminasi buatan (IB) maupun intensifikasi kawin alam (INKA) untuk mendukung program PSDSK tahun 2014.
9. Sehubungan dengan semakin sempitnya lahan padang penggembalaan akibat alih fungsi lahan, dianjurkan agar peternakan Sapi memperluas areal Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan limbah pertanian sebagai bahan pakan ternak.
10. Pelaksanaan Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian RI No. 18 Tahun 1979 dan No. 5/Inst/UM/3/79, tanggal 5 Juli 1979 tentang pencegahan dan larangan pemotongan ternak sapi, kerbau betina bunting atau bibit.
11. Pelaksanaan Instruksi Bupati Sidenreng Rappang No. 179/V/1993, tanggal 17 Mei 1993 tentang larangan pemotongan dan atau pengeluaran/pengiriman ternak sapi/kerbau bunting atau sapi/kerbau betina produktif.
12. Pengembangan Industri pada Sub - Sektor Peternakan antara lain :
 - a. Industri Abon.
 - b. Industri Pakan Ternak (Ayam, Sapi dan Ikan).
 - c. Industri Pembuatan Pupuk Kandang (Fine Gompost)
 - d. Industri Pembuatan Kandang Ayam Ras (Petelur)
 - e. Industri Tepung Telur.
 - f. Industri fellet (Pembesaran Ayam).
 - g. Industri Biogas

Sektor Perikanan.

1. Beberapa jenis ikan yang direkomendasikan untuk dibudidayakan melalui sistem mina padi, kolam, keramba terapung sebagai berikut : Ikan Mas, Ikan Nila, lele, Ikan Gurami, Ikan Bawal, Ikan Tawes, Ikan Sepat Siam, , Ikan Patin dan sementara di Danau adalah ikan Mas, Nila, Gabus, Betot dll.

2. Guna meningkatkan kegiatan Mina Padi, maka sangat penting mendapatkan pengamanan oleh semua pihak, guna menghindari kerugian masyarakat akibat karena pencurian yang menggunakan strom / racun.
3. Guna menjaga populasi ikan di Danau, maka nelayan diharapkan tidak menggunakan bom ikan, jaring kecil, atau alat - alat tangkapan yang dilarang dalam peraturan (sesuai Perda No. 4 Tahun 2010).
4. Meningkatkan pembinaan kepada kelompok nelayan dan masyarakat pembudidaya ikan, untuk senantiasa mengembangkan usahanya dengan memperhatikan keadaan permintaan pasar.
5. Pengawasan penggunaan Alat Elektronik (Pakkonta), alat beracun (Tuba dan Pestisida) sesuai dengan instruksi Bupati Sidenreng Rappang No. 100 tahun 2001 tentang : Pengawasan dan pencegahan penangkapan ikan yang menggunakan alat terlarang dan pemasangan Bungka Toddo serta Bagan yang tidak memiliki Izin (Perda No. 4 Tahun 2010) dengan sanksi pidana sesuai pasal 26 (2) kurungan 6 Bulan / denda paling banyak 50 Juta.
6. Menumbuh kembangkan minat masyarakat untuk usaha budidaya ikan dalam rangka capaian produksi terbesar dunia pada tahun 2015.

C. Sub Sektor Perkebunan.

1. Kegiatan Gernas Kakao yang meliputi ; intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan serta Komoditi Kakao melalui kegiatan Sambung samping, sangat disosialisasikan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan kegiatan pembinaan tentang teknik budidaya kakao yang sesuai tekhnis, melalui kegiatan penyuluhan secara berkala.
3. Guna meminimalkan terjadinya penggerek buah kakao melalui kegiatan kondomisasi atau penyarungan, pemangkasan, pemberian pupuk, sanitasi perkebunan penggunaan bibit yang bermutu serta melakukan kegiatan pengendalian dengan sistem biologis yaitu penggunaan semut merah besar.
4. Terhadap komoditi perkebunan lainnya, yang memiliki prospek pasar dan sesuai kondisi agroklimat daerah, hendaknya terus dikembangkan dan dimasyarakatkan seperti komoditi vanili dan lada, dll.
5. Guna melindungi masyarakat dari kegiatan kemitraan terhadap komoditi perkebunan tertentu, hendaknya melakukan monitoring dan pengawasan, hal ini penting untuk melindungi petani dari oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab.

6. Industri perkebunan dikembangkan oleh masyarakat dan perlu mendapatkan pembinaan adalah : Pengkacipan Jambu Mete, Industri Jus Buah Semu Mete, Industri Penyaringan Kakao Industri Fermentasi Kakao yang mengarah Kualitas.

D. Sub Sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

1. Mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pertanian dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, khususnya mengenai aspek kemiringan dan ketebalan solum tanah.
2. Pada daerah kawasan hutan, kiranya mendapatkan pengawasan maksimal oleh petugas polisi hutan, bekerjasama dengan pihak yang berwenang.
3. Menggiatkan kegiatan penanaman dan pemeliharaan minimal 1,5 juta pohon dalam rangka mendukung program 1 milyar pohon.
4. Sanksi bagi pelanggar pada sub sektor Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - a. Pelanggaran antara lain :
 1. Pencabangan dan perambahan hutan serta penyerobotan hutan.
 2. Pengangkutan hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu yang tidak sah.
 - b. Sanksi sanksi antara lain :
 1. Apabila melakukan pemanfaatan, penguasaan dan hasil hutan tanpa disertai dengan izin yang berwenang maka dikenakan sanksi sesuai Undang - undang No. 41 tahun 1990 tentang Kehutanan dengan hukuman penjara 10 tahun atau denda sebesar 100 Juta Rupiah.
 2. Mendorong akses masyarakat melalui hutan berbasis masyarakat (PHBM) dengan skema hutan Desa (HD), hutan kemasyarakatan (HKM) dan Hutan Tanam Rakyat (HTR) dalam kawasan hutan.
 3. Memanfaatkan dan mengelola lahan kritis dan terlantar milik masyarakat melalui skema Hutan Rakyat Terpadu (Sektor Pertanian) dalam rangka meningkatkan Ketahanan Pangan dan nilai ekonomi.
 4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis melalui upaya reboisasi, Pengkayaan dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian hutan sebagai pengendali Tata Air dan Iklim.

5. Meningkatkan kegiatan penghijauan lingkungan melalui penyediaan bibit - bibit penghijauan penanaman pohon di fasilitas umum, fasilitas sosial serta Lingkungan Rumah Tangga.
6. Memberantas ilegal logging, perambahan hutan melalui kerjasama semua komponen masyarakat dan pemerintah serta menerapkan sanksi / aturan sesuai ketentuan per-undangan yang berlaku.
7. Membangun konservasi Tanah dan Air (Dam penahan, Embung-embung dan sumur resapan) sebagai upaya mengembalikan fungsi tata air dan menambah air bawah tanah.

III. HASIL RUMUSAN POKJA C

Berdasarkan hasil rumusan dan berbagai petunjuk dari Narasumber masyarakat, dalam Musyawarah Tudang Sipulung Tingkat Kecamatan, maka disepakati hasil sebagai berikut :

A. Bidang Pengembangan Sarana

1. Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan lahan antara lain : Traktor, pompa air alat tanam dan pengolahan lainnya.
2. Peningkatan sarana pengolahan produksi pada semua sektor *lingkup Pertanian*.
3. Khusus penggilingan beras untuk menunjang kuantitas dan kualitas, masih perlu peningkatan sarana antara lain ; alat/mesin pengering gabah, mesin/peralatan mesin penggilingan yang lebih memadai.
4. Sarana KUD dapat diinventarisir ulang untuk mengetahui aset yang ada sekarang pada masing - masing KUD.

B. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Produksi

1. Upaya pembinaan secara berkesinambungan mulai dari pra pengolahan sampai pada pasca panen lebih ditingkatkan.
2. Perlu adanya standar produk khususnya beras, baik varietas maupun kualitas.
3. Adanya kesepahaman/kesadaran para pengusaha untuk *menjaga/mentaati aturan yang berlaku*, terutama pengusaha yang tergabung dalam kemitraan. Dihimbau kepada petani/pengusaha agar mau mengolah/merawat hasil panennya untuk meningkatkan nilai tambah.

C. Bidang Kelembagaan Usaha

1. Lembaga Kelompok Tani dapat lebih pro aktif dalam kemitraan dengan pengusaha dan dolog. Lembaga Koperasi diupayakan untuk dibangkitkan kembali dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat.
2. Peningkatan sumber daya anggota kelompok produksi pertanian dan perkebunan.
3. Peningkatan sumber daya anggota kelompok produksi pertanian dan perkebunan.
4. Diharapkan pihak Divre Bulog Sidrap dapat lebih meningkatkan jumlah stock pembelian gabah/beras dari petani, kelompok tani atau mitra setiap tahun, seiring dengan peningkatan produksi gabah/beras.

D. Bidang Pemasaran

1. Peranan Distributor dan Pengecer Pupuk dalam pengadaan dan penyaluran untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk di tingkat petani, distributor melakukan stock list pupuk di gudang pada posisi Bulan September, Oktober dan November untuk penggunaan musim tanam Bulan Desember dan Januari.
2. Para petani/kelompok tani dianjurkan untuk membeli Saprodi kepada agen resmi dan permintaan pupuk harus berdasarkan DP3.
3. Peningkatan pengawasan dan pemantauan oleh komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) terhadap segala bentuk penyaluran, penyimpanan dan penggunaan pupuk dan pestisida yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer dan user / pengguna serta pihak yang terkait.
4. Untuk mengatasi kerugian petani akibat anjloknya harga gabah, jagung, kedelai dll yaitu dengan sistem resi gudang, karena dengan resi gudang petani dapat mengajukan pembiayaan lembaga keuangan (perbankan/non perbankan) yang sudah terkait kerjasama (kontrak) untuk memenuhi uang tunai.
5. Pemasaran hasil Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan
 - a. untuk menjaga stabilitas harga produk strategis dengan melakukan operasi pasar apabila harga telur, jagung, gabah / beras (produk strategis) dianggap merugikan petani / peternak yang disebabkan oleh spekulasi harga oleh pedagang, hal tersebut dapat diatasi dengan memanfaatkan dana bantuan masyarakat (petani / peternak) untuk melakukan operasi pasar.

- b. Peningkatan kuantitas dan kualitas hasil perkebunan untuk tujuan ekspor, khususnya kakao dan kacang mete
 - c. Peningkatan kualitas produk gula merah untuk tujuan pasar antar pulau khususnya mengenai kemasan.
 - d. Memperluas jaringan perdagangan dengan melakukan survei pasar untuk produk strategis khususnya telur ke wilayah Indonesia Timur.
6. Kepada pihak perbankan dihimbau dapat mengucurkan dana kepada pengusaha kecil menengah sesuai prosedur perbankan dengan kebijakan kemudahan dalam pelayanan administrasi dan penentuan jumlah agunan yang dipersyaratkan.

Perdagangan bebas regional AFTA adalah wilayah perdagangan bebas yang mencakup seluruh negara – negara ASEAN, dimana pada tahun 2003 yang lalu mulai diberlakukan arus lalu lintas barang dagangan yang berasal dari Negara anggota, bebas keluar masuk dalam wilayah ASEAN hanya dengan hambatan tarif 0 – 5 % dan tak boleh lagi ada hambatan non tarif.

Dengan perdagangan bebas ASEAN ini harus segera direspon oleh Daerah Otonomi agar siap menghadapi antara lain dipahami dan dipegang tergelirnya komitmen kesepakatan internasional.

Manfaat dan akselerasi perdagangan bebas tidak akan banyak dipetik oleh daerah otonomi jika tidak berjalan secara bersamaan dengan peningkatan kuantitas dan kualitas produk sektor pertanian yang didukung efisiensi dan produktifitas sektor industri dan perdagangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka sesuai dengan salah satu visi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2008 – 2013 yaitu Terwujudnya Sidrap sebagai Pusat Agribisnis Modern, dengan program prioritas:

1. Pengembangan Komoditi Pertanian melalui konsep pengembangan agribisnis.
2. Pemenuhan Sarana Produksi serta peningkatan kuantitas dan kualitas produk.
3. Peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan.
4. Pengembangan pangsa pasar.
5. Peningkatan kegiatan investasi.

IV. REKOMENDASI

- a. Dalam rangka menjaga stabilitas harga gabah yang ditetapkan oleh pemerintah Tahun 2013, perlu dilakukan pengawasan terhadap oknum pedagang yang merugikan petani dengan melakukan pembelian harga gabah panen di bawah harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk mengantisipasi stabilitas harga Pihak Bulog Sidrap harus melakukan pembelian gabah di lapangan melalui Satgas.
- b. Untuk Mendorong pengembangan jagung di daerah ini, masyarakat petani menghendaki adanya penetapan Harga Dasar Jagung oleh Pemerintah Pusat, yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- c. Sarana dan Prasarana Irigasi sebagai Faktor Penunjang Utama dalam pengembangan pertanian, sudah saatnya Pemerintah provinsi dan pusat memprioritaskan Pembangunan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi, antara lain : Rehabilitas Bendung Benteng, Bila, lanjutan Pembangunan Bendung Alakaraja dan pembangunan Bendung Torere.
- d. Guna mencapai tujuan peningkatan produksi yang telah dituangkan dalam keputusan Hasil Rumusan Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Tahun 2013, diusulkan adanya Komisi Penanggulangan dan Penanganan Sanksi Terhadap Pelanggaran Keputusan Musyawarah Tudang Sipulung.
- e. Jika saluran Irigasi telah dibuka sesuai jadwal yang telah disepakati, tidak akan ada lagi pekerjaan proyek di daerah irigasi yang sifatnya mengganggu kelancaran air kecuali hal luar biasa.

V. PENUTUP

Dalam rangka terwujudnya produksi yang diharapkan maka, peningkatan koordinasi antara instansi teknis harus terlaksana dengan baik, dan berkesinambungan, cepat menyelesaikan permasalahan - permasalahan di lapangan dengan membentuk posko - posko, sehingga penanggulangannya dapat tertangani dengan cepat dan tepat.

Pencapaian rencana produksi dimaksud, hendaknya didukung oleh masyarakat dengan mematuhi keputusan Hasil Musyawarah Tudang Sipulung Tahun 2013 yang dibarengi dengan peningkatan pembinaan kepada masyarakat tani secara luas.

Demikian Hasil Rumusan Musyawarah Tudang Sipulung Terpadu Tahun 2013 yang menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan pertanian pada musim tanam 2013 dan musim tanam 2013/2014.

